



**PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN
WILAYAH GUNA MENUNJANG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 1995-1999**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Linda Dratiwi
NIM : 970810101002

Asal:

Terima

No. In

KLASIR/ E. YAT

Hadiah

mbelian

17 APR 2002

0669

SKS. 1

Klass

352

PR A

7

e.1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2 0 0 2

JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI
PENGEMBANGAN WILAYAH GUNA MENUNJANG IMPLEMENTASI
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 1995 - 1999.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : LINDA PRATIWI

N. I. M. : 970810101002

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

09 MARET 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Drs. H. Edi Suswandi, MP

NIP. 131 472 792

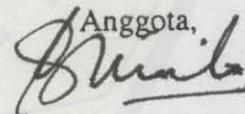
Sekretaris,



Dra. Hj. Riniati, MP

NIP. 131 624 477

Anggota,



Drs. J. Sugiarto, SU

NIP. 130 610 494

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Drs. Liakip, SU

NIP. 120 531 976



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kaitan
Penentuan Sektor Unggulan Daerah Sebagai
Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten
Probolinggo Tahun 1995-1999

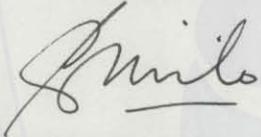
Nama Mahasiswa : LINDA PRATIWI

N I M : 970810101002

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

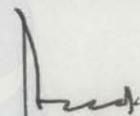
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



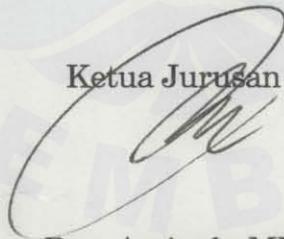
Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

Pembimbing II



Drs. Rafael Purতোমো S, MSi
NIP. 131 793 384

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : Maret 2002

Kupersembahkan karya ini untuk :

- Bapak dan Ibu yang tiada terputus doa dan kasih sayang yang tercurah dalam mengiringi langkahku mencapai cita-cita;
- Adik-adikku tersayang, Lia dan Utik yang senantiasa mendoakan dan mendukungku;
- Pakdhe Imam dan Budhe Fauzi sekeluarga yang senantiasa mendoakan serta memberi motivasi dalam menyelesaikan studiku;
- Ibu Sudarno dan keluarga besar Kal'23 yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan studi;
- Pendamping hidupku kelak;
- Almamater yang kubanggakan.

Motto :

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. Al Mujaadalah : 11)

Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatKu maka sesungguhnya azabKu sangat pedih.

(QS. Ibrahim : 7)

Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina

(Al Hadits)

Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan

(Anonim)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepadaKu-lah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al Insiroh : 5-8)

ABSTRAKSI

Judul : Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kaitan Penentuan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999

Oleh : Linda Pratiwi

Penelitian mengenai "Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kaitan Penentuan Sektor Unggulan Daerah Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999" bertujuan untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat di Kabupaten Probolinggo, sektor atau sub sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran kuat dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo dan apakah sektor unggulan tersebut sama atau tidak dengan sektor yang kuat koefisien pergeserannya dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah Kabupaten Probolinggo dengan pertimbangan daerah tersebut mempunyai potensi sektoral yang dapat dikembangkan untuk pembangunan dan kemajuan daerah dengan waktu penelitian 1 November - 30 November 2001.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis sektor unggulan dengan metode LQ Statis untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat pada saat tertentu atau posisi suatu sektor sedangkan metode LQ Dinamis digunakan untuk mengetahui reposisi suatu sektor. Untuk menentukan kecenderungan kekuatan suatu sektor mengalami pergeseran digunakan analisis koefisien pergeseran (CR). Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian deskriptif.

Pembangunan di Kabupaten Probolinggo tahun 1995-1999 mengacu pada sektor unggulannya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, dan sektor pertanian. Kecenderungan kekuatan pergeseran suatu sektor yang mempunyai nilai lebih besar dari nol adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor konstruksi dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang menjadi unggulan tidak sama dengan sektor yang mempunyai kekuatan pergeseran. Perbedaan ini disebabkan karena yang menentukan kekuatan pergeseran suatu sektor adalah: pertumbuhan ekonomi sektoral, pertumbuhan PDRB sektoral, dan distribusi PDRB sektoral. Sektor unggulan dengan LQ ditentukan oleh variabel kemampuan pertumbuhan ekonomi, nilai tambah dan DLQ ditentukan oleh gabungan nilai tambah serta pertumbuhan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul : **PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH GUNA MENUNJANG IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 1995-1999** dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Drs. J. Sugiarto, SU selaku dosen pembimbing I dan Drs. Rafael Purতোমো Somaji, MSi selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dra. Aminah, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Pimpinan Kantor BPS Kabupaten Probolinggo beserta staf dan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo beserta staf yang telah banyak membantu dalam memperoleh data;
5. Sahabatku tercinta Syaodah, atas kebersamaan, kegembiraan dan kesedihan yang kita alami bersama semoga menjadi kenangan indah tak terlupakan; juga yang tersayang Maya, Ira, Yani, Anis, Halimatus, Diah Miswanti, Diah Tri, atas kebersamaan dan kegembiraan kita sejak awal semoga menjadi kenangan manis tak terlupakan serta yang tak pernah

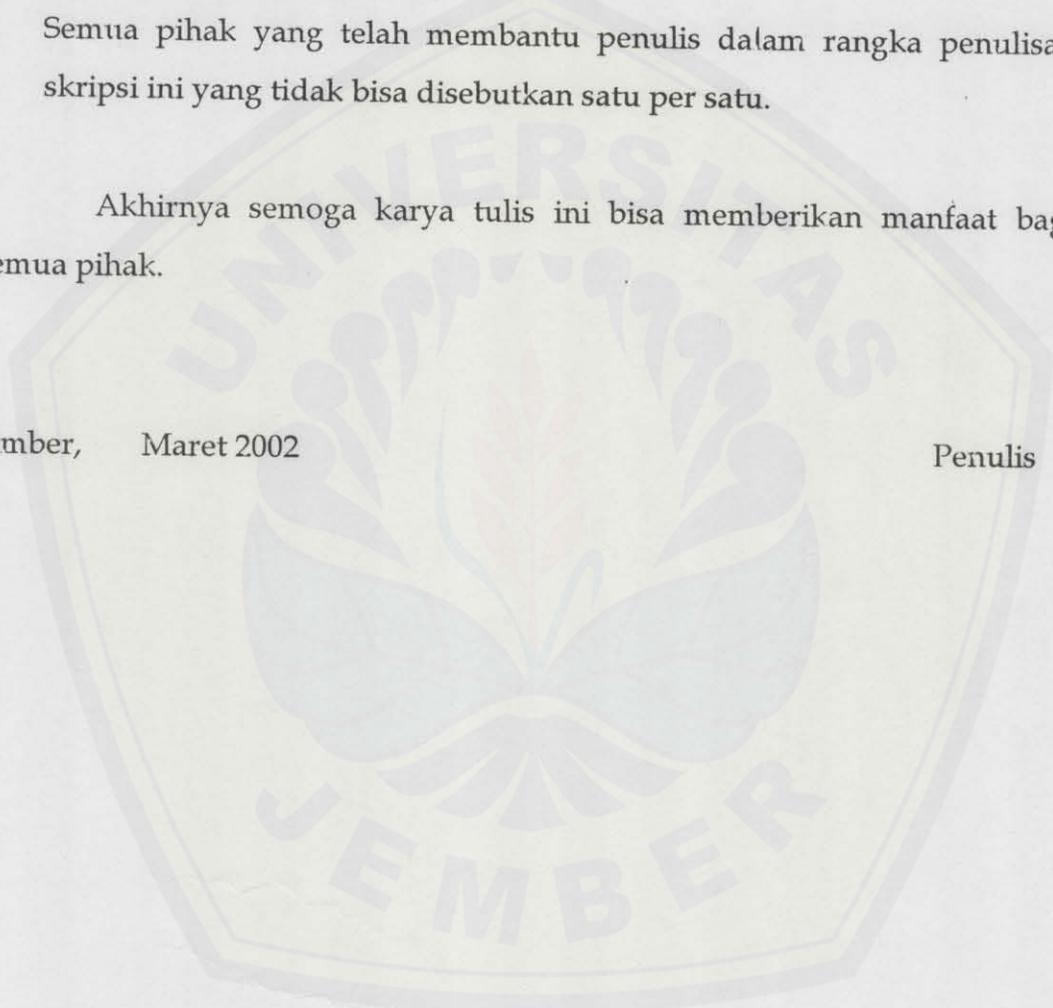
terlupakan Mbak Ciplis yang telah banyak memberi masukan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan studi:

6. Mas Sonny Boy, atas dukungannya dan kesabarannya menemani penulis sampai ujian berakhir;
7. Teman-temanku seperjuangan di SP-GP '97;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, Maret 2002

Penulis

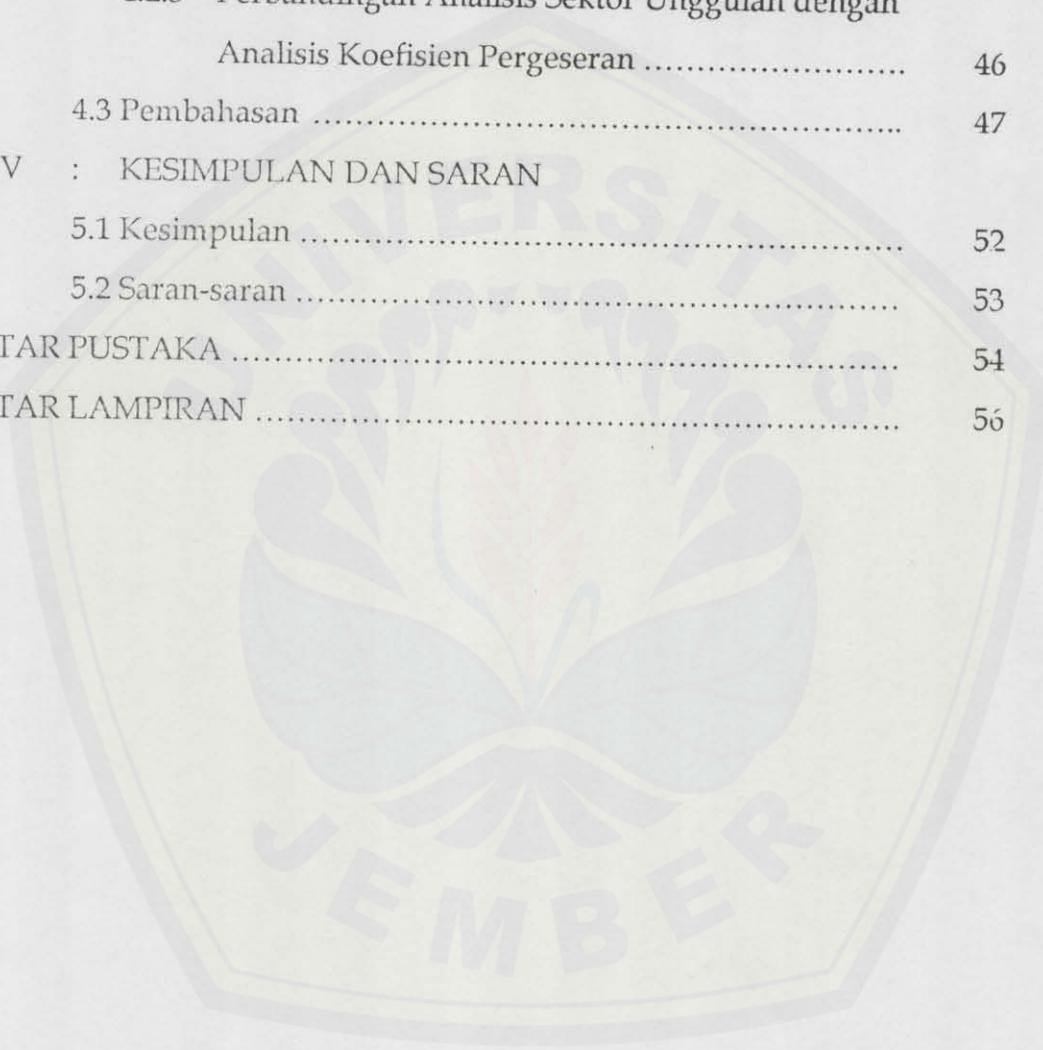


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Konsep Otonomi Daerah	10
2.2.2 Konsep PDRB	12
2.2.3 Koefisien Pergeseran (CR)	16
2.2.4 Konsep LQ Statis dan DLQ	17
2.2.5 Skallogram	19

BAB III	:	METODE PENELITIAN	
3.1		Rancangan Penelitian	21
3.1.1		Jenis Penelitian	21
3.1.2		Unit Analisis	21
3.1.3		Populasi	21
3.2		Prosedur Pengumpulan Data	22
3.3		Metode Analisis Data	22
3.3.1		Analisis Sektor Unggulan	22
3.3.2		Analisis Koefisien Pergeseran (CR)	26
3.3.3		Perbandingan Analisis Sektor Unggulan dengan Analisis Koefisien Pergeseran	27
3.4		Definisi Variabel Operasional	27
BAB V	:	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1		Gambaran Umum	29
4.1.1		Keadaan Geografis	29
4.1.2		Kependudukan	30
4.1.2.1		Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	30
4.1.2.2		Kepadatan Penduduk	32
4.1.2.3		Distribusi Penduduk Mnrst Lap. Usaha ..	33
4.1.3		Pendapatan Regional Per Kapita Kab. Prob.	34
4.1.4		Kesempatan Kerja	35
4.1.5		Struktur Ekonomi Kab. Probolinggo	36
4.1.6		Pertumbuhan Ekonomi Kab. Probolinggo Tahun 1995-1999	38
4.2		Analisis Data	39
4.2.1		Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kab. Prob.	39

4.2.1.1 Analisis LQ	39
4.2.1.2 Analisis DLQ	44
4.2.1.3 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	45
4.2.2 Analisis Koefisien Pergeseran (CR)	45
4.2.3 Perbandingan Analisis Sektor Unggulan dengan Analisis Koefisien Pergeseran	46
4.3 Pembahasan	47
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

1. Penduduk Kabupaten Probolinggo Menurut Usia Kerja Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980 dan Tahun 1990	30
2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1980 dan Tahun 1990	31
3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 dan Tahun 1990	33
4. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Probolinggo Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999	34
5. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Probolinggo Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama tahun 1999	36
6. Peranan Sektor PDRB Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993	37
7. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999	39
8. Hasil Perhitungan LQ Statis Per Sektor Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993	40
9. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993	42

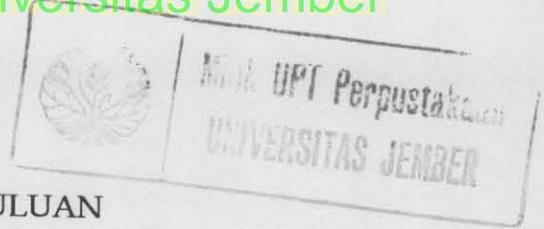
10. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Probolinggo tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993	43
11. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Jasa-jasa Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993	44



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993, Tahun 1995-1999	56
2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur ADHK Tahun 1993, Tahun 1995-1999	57
3.	Perhitungan LQ Tahun 1995 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	58
4.	Perhitungan LQ Tahun 1996 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	59
5.	Perhitungan LQ Tahun 1997 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	60
6.	Perhitungan LQ Tahun 1998 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	61
7.	Perhitungan LQ Tahun 1999 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	62
8.	Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1995 ADHK Tahun 1993	63
9.	Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1996 ADHK Tahun 1993	64
10.	Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1997 ADHK Tahun 1993	65
11.	Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998 ADHK Tahun 1993	66
12.	Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1999 ADHK Tahun 1993	67

No.	Judul	Halaman
13.	Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Per Sektor tahun 1995-1999 Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	68
14.	Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Per Sektor tahun 1995-1999 Propinsi Jawa Timur ADHK Tahun 1993	69
15.	Perhitungan DLQ Per Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	70
16.	Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	71
17.	Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Propinsi Jawa Timur ADHK Tahun 1993	72
18.	Perhitungan DLQ Sub Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993	73
19.	Perhitungan Koefisien Pergeseran (CR) ADHK Tahun 1993 di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999	74
20.	Perhitungan Skalling Sektor di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993	76
21.	Perhitungan Skalling LQ Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999	77
22.	Perhitungan Skalling DLQ Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999	78
23.	Perhitungan Skalling Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999	79
24.	Perhitungan Skalling Total Berdasarkan Skalling LQ, DLQ dan Pertumbuhan Ekonomi	80



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Garis-garis Besar Haluan Negara (Sinar Grafika, 1999a:17) memberikan arah terhadap misi bangsa Indonesia masa depan dalam pembangunan daerah yaitu perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi tersebut memberikan arah kebijakan dalam pembangunan bidang ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

Memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka pemberian kewenangan otonomi daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah diutamakan dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 Tahun 1999:56).

Peletakan dasar otonomi daerah, dilihat dari sudut pandang perencanaan pembangunan, haruslah mampu membaca hasil *monitoring* (pemantauan) dan evaluasi umpan balik pelaksanaan pembangunan tahun yang lewat (*feed back*), disesuaikan dengan keberadaan tahapan strategi pembangunan daerah yang mengacu pada strategi pembangunan nasional, dengan parameter dan tolok ukur yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan. Apabila dalam pemantauan dan evaluasi terdapat kesalahan dalam menganalisa hasil perencanaan pembangunan daerah, apalagi terdapat adanya pemaksaan kepentingan-kepentingan *top down* yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedang kabupaten/kota merupakan subsistem dari sistem pembangunan provinsi, bisa dipastikan program yang akan disusun menjadi salah arah. Ini menjadi peringatan dalam meletakkan dasar otonomi daerah, yang akan memberi makna bagi mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah berlaku efektif pada tahun 2001, dimana diberlakukannya dua tahun setelah diundangkan dalam Lembaran Negara pada Mei 1999. Menurut Ryaas Rasyid (dalam Dwidjowijoto, 2000:142), inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dengan otonomi, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut setiap daerah harus sudah mempersiapkan diri, terutama dalam rangka pembangunan ekonominya. Karena kemajuan pembangunan ekonomi menjadi faktor terpenting sebagai

tolok ukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kemajuan dalam bidang lainnya tanpa diikuti kemajuan bidang ekonomi, maka rakyat akan tetap berada pada kekurangan dan kesengsaraan.

Pemilihan secara tepat terhadap sektor-sektor yang berperan penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan lebih dahulu di suatu daerah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Prioritas tersebut dapat ditentukan dengan melihat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya serta melihat sektor penghasil nilai ekspor yang besar. Hal ini berarti disamping pengembangan sektor tersebut dapat mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang saling menunjang dan melengkapi sektor pemimpin maka pengembangan sektor tersebut juga dapat memberikan surplus neraca pembayaran sebesar-besarnya, sehingga dapat dipergunakan untuk akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi selanjutnya (Irawan dan Suparmoko, 1992:265).

Sektor unggulan daerah menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipasarkan dan dimanfaatkan di daerah maupun di luar daerah bersangkutan. Penjualan keluar daerah menghasilkan pendapatan bagi daerah. Arus pendapatan di luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak hanya meningkatkan permintaan sektor prioritas tetapi juga meningkatkan permintaan sektor non prioritas. Permintaan yang naik akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal sektor non prioritas merupakan investasi yang didorong (*induce*) oleh sektor prioritas (Arsyad, 1999:141).

Salah satu aspek pertimbangan ilmiah dari suatu perencanaan pembangunan daerah adalah dengan konsep keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif daerah yang dikreasikan dengan keunggulan kompetitif akan menjadikan daya hidup yang besar bagi ekonomi daerah, serta memberikan optimisme terhadap terselenggarakannya pembangunan secara berkesinambungan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan pula.

Kabupaten Probolinggo sebagai bagian integral dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mendapat kewenangan otonomi, harus mampu melaksanakan pembangunan wilayah secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki agar pemberian otonomi bukan sebagai bencana tetapi justru menjadi peluang untuk mengelola pembangunan daerah dengan lebih baik atas prakarsa sendiri.

Secara umum keadaan ekonomi makro Kabupaten Probolinggo dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan tahun 1993 pada tahun 1995-1997 selalu meningkat yaitu berturut-turut sebesar 1.286.850,35 rupiah; 1.385.991,14 rupiah; 1.438.174,52 rupiah. Namun, akibat terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan PDRB Kabupaten Probolinggo tahun 1998 menurun yakni sebesar 1.308.718,53 rupiah. Pada tahun 1999, dampak krisis sudah mulai dapat diatasi sehingga PDRB Kabupaten Probolinggo meningkat menjadi 1.320.343,22 rupiah.

Kabupaten Probolinggo sebagai daerah agraris yang sedang berkembang, pergeseran struktur ekonomi akan bergerak dari sektor primer

menuju ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini disebabkan karena percepatan pembangunan sektor primer lebih lambat dari sektor sekunder dan tersier. Sektor primer mempunyai kendala potensi alam yang tidak dapat diperbarui (Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 1999:44). Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam pembangunan Kabupaten Probolinggo perlu dilakukan sebagai upaya dalam menentukan sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas unggulan dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan daerah lebih baik dan lebih tepat sasaran.

1.2 Perumusan Masalah

Esensi otonomi daerah adalah pemberdayaan ekonomi rakyat sehingga sukses tidaknya otonomi daerah tersebut tergantung dari kemampuan daerah dalam memberdayakan rakyat di segala bidang termasuk sektor ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan rakyat berarti lebih banyak nilai tambah, maka dampak pemberdayaan yang dilakukan oleh rakyat akan dinikmati oleh rakyat pula. Lebih banyak nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang diciptakan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD). Dalam hal ini hubungan antara sektor prioritas (unggulan) terhadap otonomi daerah adalah sektor atau sub sektor yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat. Indikator sektor ekonomi adalah sektor yang mampu meningkatkan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi atau kesempatan kerja.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah tingkat II di Propinsi Jawa Timur yang mendapat kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga penentuan sektor atau sub sektor unggulan

daerah yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang: (a) sektor atau sub sektor apakah yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat di Kabupaten Probolinggo; (b) sektor atau sub sektor apakah yang mempunyai kemampuan pergeseran menguat dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo; (c) apakah sektor unggulan tersebut sama atau tidak dengan sektor yang kuat pergeserannya dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. sektor atau sub sektor yang mampu memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat di Kabupaten Probolinggo;
- b. sektor atau sub sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran menguat dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo;
- c. kesamaan antara sektor atau sub sektor unggulan dengan sektor yang kuat pergeserannya dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :

- a. bahan informasi lebih lanjut bagi para peneliti lain dalam penelitian sejenis di tempat lain ataupun penelitian yang lebih luas;

- b. sumbangan informasi serta pemikiran bagi pemerintah daerah setempat guna menentukan prioritas pembangunan sektor atau sub sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.





II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Mukaromah (2000) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penetapan Prioritas Sektoral di Kabupaten Jember Tahun 1994-1998" bertujuan, yakni (1) untuk mengetahui sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember; (2) untuk mengetahui sektor yang potensial dijadikan sebagai sektor prioritas di masa yang akan datang di Kabupaten Jember. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis LQ (*Location Quotient*) untuk mencapai tujuan yang pertama dan metode analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*) digunakan untuk mencapai tujuan yang kedua. Berdasarkan metode analisis LQ diketahui terdapat empat (4) sektor prioritas, yaitu sektor pertanian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dengan menggunakan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) diketahui bahwa sektor yang potensial dijadikan sebagai sektor prioritas di masa yang akan datang adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Irawati (2000) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penetapan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994-1998" bertujuan, yakni (1) untuk mengetahui sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro pada tahun 1994-1998; (2) untuk mengetahui kekuatan sektor tertentu sebagai prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Untuk mencapai

tujuan yang pertama digunakan alat analisis dengan metode analisis LQ (*Location Quotient*) dan untuk mencapai tujuan yang kedua dengan menggunakan metode analisis *Coefisient Resuffle* (CR). Berdasarkan metode analisis *Location Quotient* (LQ) diketahui terdapat empat (4) sektor basis, yaitu sektor pertanian; sektor jasa-jasa; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dengan menggunakan metode analisis *Coefisient Resuffle* (CR) diketahui bahwa sektor yang mempunyai kecenderungan menguat adalah sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian dan alat analisis yang sama dengan penelitian sebelumnya, yakni untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang menjadi unggulan serta sektor atau sub sektor yang kuat koefisien pergeserannya. Perbedaannya selain pada lokasi/daerah penelitian dan periode tahun analisis yang berbeda juga untuk menentukan sektor unggulan dalam konteks otonomi daerah ada beberapa tambahan indikator, yaitu: (a) kontribusi terhadap pendapatan daerah (PAD); (b) kontribusi pertumbuhan ekonomi; (c) kesempatan kerja sektoral. Untuk menentukan klasifikasi sektor unggulan digunakan analisis Skalling. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kabupaten Probolinggo dengan periode tahun analisis antara tahun 1995-1999.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dirumuskan sebagai berikut "Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"(UU No. 22 Tahun 1999:55).

Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian tersebut, Daerah diberi berbagai wewenang untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan berhak untuk mempunyai organisasi sendiri mengangkat pegawai sendiri serta menggali sumber-sumber pendapatan sendiri (Soemodiningrat, 1997).

Kewenangan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 Tahun 1999:56).

Paradigma otonomi daerah pada intinya adalah bahwa otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pemberdayaan rakyat, demokrasi,

keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini pemberdayaan rakyat termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi penentu. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan otonomi daerah dalam jangka panjang ditentukan oleh kemampuan daerah untuk memberdayakan partisipasi ekonomi rakyat. Untuk itu kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini harus mendukung pemberdayaan ekonomi daerah tersebut. Beberapa langkah kebijakan yang bisa ditempuh antara lain (Rafael, 2000:13-14) :

- a. upaya inventarisasi potensi ekonomi daerah dengan melakukan pemetaan menyeluruh baik mengenai daya dukung sumber daya, aktivitas ekonomi yang potensial dan yang riil hingga jaringan pasar. Dalam hal ini pemahaman peluang, kendala maupun kekuatan dan kelemahan sangat penting, sebab pemahaman ini akan menjadi pijakan kebijakan pengembangan.
- b. upaya menginventarisasi kelembagaan ekonomi daerah baik korporasi non koperasi serta koperasi. Juga pemahaman peluang, kendala serta kekuatan dan kelemahan menyeluruh dan tepat harus dijadikan pijakan pengembangan ke depan.
- c. upaya inventarisasi potensi pendapatan daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai UU No. 25 dan 26 Tahun 1999. Sehingga upaya kebijakan yang tepat baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi segera bisa dilaksanakan. Hal ini perlu untuk memahami kemampuan daerah secara menyeluruh.

Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan suatu daerah dalam menerapkan otonomi daerah di wilayahnya. Disinilah kemampuan dan kemandirian daerah akan diuji,

apakah ia layak untuk menggagas cita otonomi daerah di wilayahnya itu atau tidak, semuanya bergantung pada masing-masing daerah. Inilah nafas demokrasi yang menjadi substansi otonomi daerah di era reformasi. Kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesungguhnya terletak pada kemampuan masing-masing daerah dalam memobilisasi segenap potensi sumber daya daerah secara optimal (Rafael, 2000:14).

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha, yang melakukan usahanya di suatu daerah (*region*) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu. Dengan demikian PDRB mencerminkan *production originated* dari suatu daerah tertentu.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku adalah semua pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto;
- b. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari

tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

Penghitungan PDRB mempunyai manfaat bagi berbagai pihak yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. mengetahui dan menelaah struktur perekonomian suatu daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui suatu daerah merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa,
- b. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Artinya dalam penghitungan PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Perbandingan ini dapat memberikan gambaran kenaikan atau penurunan, terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak dan lain-lain,
- c. membandingkan perekonomian antar daerah, yang digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain. Perbandingan tersebut penting bagi suatu daerah karena dapat diketahui tingkat kemajuan daerah tersebut, termasuk kriteria daerah maju atau daerah yang masih terbelakang,
- d. merumuskan kebijaksanaan pemerintah, yaitu dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

PDRB dapat dihitung dengan dua metode, yaitu (a) metode langsung; (b) metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil penghitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut. Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi, yaitu mengalokasi pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator.

Metode langsung dilakukan dengan mempergunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Pendekatan ini banyak digunakan pada perkiraan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan produksi yang berbentuk barang, seperti pertanian, industri, pertambangan dan sebagainya. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.
- b. pendekatan pendapatan, yaitu nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dalam hal sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya mencari untung surplus usaha tidak

diperhitungkan. Bunga netto, sewa tanah dan keuntungan termasuk surplus usaha. Metode pendapatan ini lebih banyak digunakan pada sektor yang produksinya berupa jasa seperti sektor lembaga keuangan dan jasa-jasa. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak tersedianya atau kurang lengkapnya data mengenai nilai produksi dan biaya antara.

- c. pendekatan pengeluaran, yaitu bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau dilihat dari segi penggunaan maka *total supply* dari barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan *stock* dan ekspor netto. Dipakai ekspor netto karena yang akan dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri saja, maka dari jumlah penyediaan perlu dikeluarkan kembali nilai impornya.

Metode tidak langsung, yaitu menghitung pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan atas nilai produk bruto atau netto, jumlah produksi phisik, tenaga kerja, penduduk, alokator tak langsung. Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator ini dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing daerah terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor atau sub sektor.

2.2.3 Koefisien Pergeseran (Coefisient Resuffle)

Koefisien pergeseran menyatakan besarnya redistribusi atau pergeseran dalam distribusi suatu sektor atau sub sektor suatu tahun dasar analisis dengan tahun akhir analisis (Warpani, 1984:84).

$$CR = \frac{\% (V_i^R 99 / V^R 99 - V_i^R 95 / V^R 95) - \% (V_i^n 99 / V^n 99 - V_i^n 95 / V^n 95)}{100}$$

Dimana:

V_i^R : nilai tambah sektor i di daerah n (rupiah)

V^R : nilai tambah semua sektor di daerah n (rupiah)

V_i^n : nilai tambah sektor i di daerah himpunan (rupiah)

V^n : nilai tambah semua sektor di daerah himpunan (rupiah)

Kriteria yang digunakan:

CR=0, berarti sektor atau sub sektor i tidak bergeser;

CR<0, berarti sektor atau sub sektor i melemah;

CR>0, berarti sektor atau sub sektor i menguat;

CR=1, berarti sektor atau sub sektor i bergeser mutlak.

Setiap sektor atau sub sektor dari suatu sektor atau sub sektor mengalami pergeseran dalam kurun waktu tertentu. Untuk menentukan kecenderungan kekuatan suatu sektor atau sub sektor tertentu digunakan analisis pergeseran, yaitu analisis *Coefisient Resuffle* (CR) (Warpani, 1984:85).

2.2.4 Konsep LQ Statis dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non-basis dapat digunakan beberapa metode, yaitu: (1) metode pengukuran langsung, dan (2) metode pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran langsung dapat dengan survey langsung untuk mengidentifikasi sektor mana yang merupakan sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal tersebut diatas, maka sebagian besar pakar ekonomi wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Beberapa metode pengukuran tidak langsung, yaitu: (a) metode melalui pendekatan asumsi, (b) metode *location quotient*, (c) metode kombinasi (a) dan (b), dan (d) metode kebutuhan minimum (Budiharsono, 1991:85).

Dari beberapa metode pengukuran tidak langsung tersebut, yang banyak dipakai adalah metode pengukuran tidak langsung dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ merupakan suatu indikator sederhana yang menunjukkan "kekuatan" atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain (Azis, 1994:233). Rumusan perbandingan antara pangsa suatu sektor pada suatu daerah dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah himpunan, disebut *Location Quotient* (LQ).

$$LQ = \frac{X_m/Y_n}{X_i/Y} \quad (\text{Yuwono, 1999:7})$$

Dimana:

LQ = *Location Quotient*

X_{in} = nilai tambah sektor i di daerah n

Y_n = PDRB daerah n

X_i = nilai tambah sektor i di daerah himpunan

Y = PDRB daerah himpunan

Nilai LQ dimulai dari nol dengan nilai satu sebagai patokan karena nilai satu menyatakan bahwa pangsa sektor di daerah bagian sama dengan pangsa sektor di daerah himpunan (Yuwono, 1999:7).

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor yang unggul pada tahun ini belum tentu unggul pada tahun yang akan datang. Sebaliknya bisa saja sektor yang belum unggul pada saat ini akan unggul di masa mendatang. Reposisi demikian dapat terjadi tergantung pada laju pertumbuhan setiap sektor di daerah bagian dibandingkan laju pertumbuhan sektor itu di daerah himpunan. Sektor yang laju pertumbuhannya di daerah bagian lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor itu di daerah himpunan, sekalipun sektor ini unggul sekarang, namun jika keadaan tidak diubah suatu ketika akan kalah bersaing dengan daerah lain. Sebaliknya sektor di daerah bagian yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laju sektor itu di daerah himpunan, maka sekalipun belum merupakan sektor unggulan sekarang, kemudian hari dapat diharapkan unggul (Yuwono, 1999:8).

Sebagai alternatifnya dapat digunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Prinsip *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sama dengan LQ statis, hanya saja DLQ menggunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral

maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun waktu tertentu sehingga LQ statis dapat dirumuskan menjadi;

$$LQ = \left\{ \frac{X_{ino}(1+g_{in})^t / Y_{no}(1+g_n)^t}{X_{io}(1+G_i)^t / Y_o(1+G)^t} \right\}$$

Jika diasumsikan bahwa $X_{ino}/Y_{no} = X_{io}/Y_o$, maka persamaan diatas menjadi *Dynamic Location Quotient* (DLQ) sebagai berikut:

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_{in}) / (1+g_n)}{(1+G_i) / (1+G)} \right\}^t$$

2.2.5 Skalogram (Skalling)

Analisa skalogram digunakan untuk menentukan rangking suatu data yang dianalisa dan analisa ini cukup representatif dipakai bagi standarisasi data. Besarnya hasil skalling ini merupakan angka relatif antara 0-100. Skalling dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut (Budiharsono, 1991:337).

$$Skalling = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

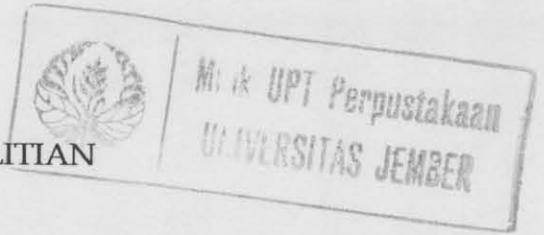
Dimana:

N = nilai pada variabel analisa

N_{\min} = nilai minimal diantara variabel-variabel analisa

N_{\max} = nilai maksimal diantara variabel-variabel analisa





III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian (Supranto, 1994:20). Penelitian deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia; obyek; set kondisi; sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi; gambaran atau lukisan secara sistematis; faktual dan akurat mengenai fakta-fakta; sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 1988:69).

Jika dilihat dari data yang digunakan, penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian *ex post facto*, hal ini dikarenakan data-data yang dianalisa diperoleh dengan cara meng-*ex post* data tahun lalu(1995-1999).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan adalah sektor-sektor ekonomi yang termasuk sektor prioritas/unggulan (*Leading Sector*). Unit analisis adalah kelompok atau orang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan sebagai basis analisis dan penarikan kesimpulan.

3.1.3 Populasi

Populasi penelitian ini adalah aktivitas sektor ekonomi di Kabupaten Probolinggo dimana secara teoritis adalah aktivitas sektor ekonomi Kabupaten Probolinggo sejak Kabupaten Probolinggo berdiri hingga saat ini.

Dalam hal ini yang dipakai sebagai wakil populasi adalah hanya mencakup periode waktu tahun 1995-1999. Alasan menggunakan tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 adalah karena pada kurun waktu tersebut perekonomian nasional termasuk perekonomian Kabupaten Probolinggo mengalami dua situasi yang saling berlawanan yakni kondisi normal dan kondisi krisis.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dengan cara mengutip/mencatat data sekunder yang telah dikumpulkan oleh instansi/badan tertentu yang telah tersusun dengan baik dan siap diolah, yaitu data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang tersusun tahun 1995 sampai tahun 1999 berdasarkan harga konstan dan harga berlaku serta studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Sektor Unggulan

Untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo digunakan tiga indikator, yakni LQ, DLQ, dan pertumbuhan ekonomi. Dari tiga indikator tersebut kemudian dirangking dengan skalogram.

- a. Analisis *Location Quotient* (LQ), yaitu rumusan perbandingan antara pangsa suatu sektor pada suatu daerah dengan pangsa sektor tersebut dengan daerah himpunan (Yuwono, 1999:6-7).

$$LQ = \frac{X_m / Y_n}{X_i / Y}$$

Dimana:

- LQ : *Location Quotient* statis sektor i di Kabupaten Probolinggo;
X_i : nilai tambah sektor i di Kabupaten Probolinggo;
Y_n : PDRB Kabupaten Probolinggo;
X_i : nilai tambah sektor i di Propinsi Jawa Timur;
Y : PDRB Propinsi Jawa Timur.

Kriteria yang digunakan:

- 1) Jika $LQ < 1$, berarti sektor tersebut bukanlah sektor unggulan bagi Kabupaten Probolinggo;
 - 2) Jika $LQ > 1$, berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Probolinggo dan mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam Propinsi Jawa Timur;
 - 3) Jika $LQ = 1$, berarti sektor tersebut di Kabupaten Probolinggo mempunyai pangsa yang sama dengan pangsa sektor di Propinsi Jawa Timur.
- b. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk mengetahui suatu sektor tersebut dapat dijadikan unggulan pada tahun yang akan datang (Yuwono, 1999:9-10).

$$DLQ = \left\{ \frac{(1+g_n)^t / (1+g_n)^t}{(1+G_i)^t / (1+G)^t} \right\}$$

Dimana:

DLQ = *Dynamic Location Quotient*

g_{in} = laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Probolinggo;

G_i = laju pertumbuhan sektor i di Propinsi Jawa Timur;

g_n = rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Probolinggo;

G = rata-rata laju pertumbuhan Propinsi Jawa Timur;

t = jangka waktu perhitungan DLQ yaitu dari tahun 1995 sampai 1999.

Kriteria yang digunakan:

- 1) Jika $DLQ = 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur;
- 2) Jika $DLQ < 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur;
- 3) Jika $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur.

- c. Untuk menghitung rata-rata laju pertumbuhan ekonomi digunakan rumus (Soebardi dkk, 1988:74):

$$g = \left(\sqrt[n]{P_n/P_1} \right) - 1 \times 100\%$$

Dimana:

- g : rata-rata laju pertumbuhan (persen)
 P₁ : PDRB tahun awal periode (1995) (rupiah)
 P_n : PDRB tahun akhir periode (1999) (rupiah)
 n : jumlah tahun analisis

- d. Analisis Skalling digunakan untuk mengetahui sektor unggulan yang harus dikembangkan lebih lanjut dari kelompok sektor unggulan yang ada di Kabupaten Probolinggo yaitu dengan rumus (Budiharsono, 1991:337):

$$Skalling = \frac{N - N_{\min}}{N_{\max} - N_{\min}} \times 100$$

Dimana:

- N : nilai pada LQ, DLQ dan pertumbuhan ekonomi serta CR;
 N_{min} : nilai minimal diantara LQ, DLQ dan pertumbuhan ekonomi serta CR;
 N_{max} : nilai maksimal diantara LQ, DLQ dan pertumbuhan ekonomi serta CR.

Kriteria yang digunakan:

- 1) Jika nilai Skalling sama dengan 100, maka sektor atau sub sektor tersebut menduduki rangking pertama;
- 2) Jika nilai Skalling kurang dari 100, maka sektor atau sub sektor tersebut menduduki rangking berikutnya.

3.3.2 Analisis Coefisient Resuffle (CR)

Untuk menghitung kekuatan pergeseran suatu sektor atau sub sektor tertentu digunakan analisis koefisien pergeseran (Warpani, 1984:84):

$$CR = \frac{\% (V_i^R 99 / V^R 99 - V_i^R 95 / V^R 95) - \% (V_i^n 99 / V^n 99 - V_i^n 95 / V^n 95)}{100}$$

Dimana:

CR : *Coefisient Resuffle*

V_i^R : nilai tambah sektor i di Kabupaten Probolinggo (rupiah);

V^R : nilai tambah semua sektor di Kabupaten Probolinggo (rupiah);

V_i^n : nilai tambah sektor i di Propinsi Jawa Timur (rupiah);

V^n : nilai tambah semua sektor di Propinsi Jawa Timur (rupiah).

Kriteria yang digunakan:

CR = 1, berarti sektor atau sub sektor i bergeser mutlak;

CR = 0, berarti sektor atau sub sektor i tidak bergeser;

CR < 0, berarti sektor atau sub sektor i melemah;

CR > 0, berarti sektor atau sub sektor i menguat.

3.3.3 Perbandingan Analisis Sektor Unggulan dengan Analisis Koefisien Pergeseran

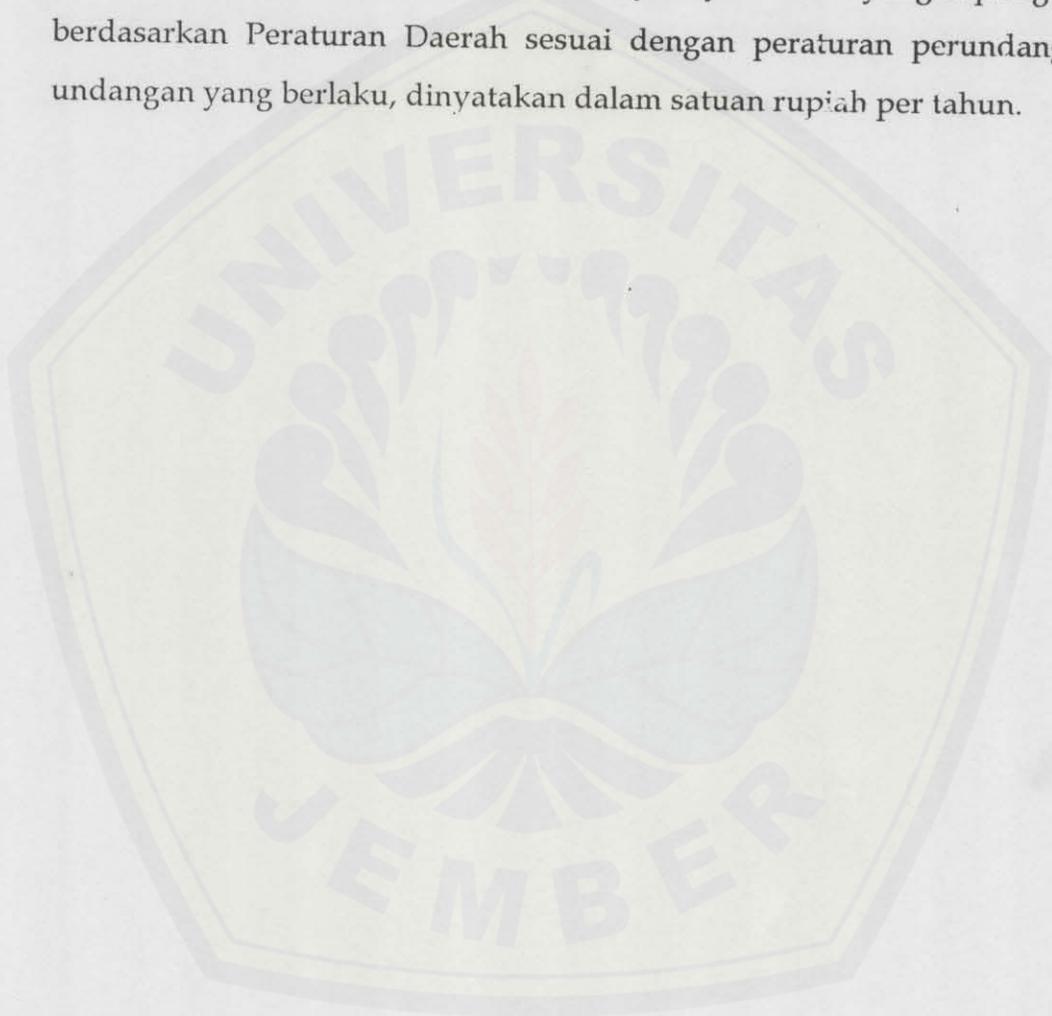
Untuk menjawab tujuan ketiga yaitu apakah sektor unggulan juga sama dengan sektor yang kuat pergeserannya dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo bisa dilakukan dengan membandingkan kedua analisis tersebut. Kriteria yang digunakan adalah dengan melihat nilai skalling dari kedua analisis tersebut. Apabila nilai skalling dari analisis sektor unggulan tersebut mempunyai nilai 100, maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan. Dan apabila nilai skalling dari analisis koefisien pergeseran mempunyai nilai 100, maka sektor atau sub sektor tersebut merupakan sektor atau sub sektor yang kuat koefisien pergeserannya.

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Untuk memperjelas pengertian masalah yang dibahas dalam skripsi ini maka digunakan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor / lapangan usaha, yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi;
- b. Nilai tambah (*Value added*) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu dikurangi biaya antara dari masing-masing total produksi bruto tiap-tiap sektor;
- c. Rata-rata pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara rata-rata per tahunnya selama tahun 1995-1999, dinyatakan dalam persen;

- d. Kesempatan kerja adalah banyaknya tenaga kerja yang terserap atau bekerja pada sektor ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun;
- e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan dalam satuan rupiah per tahun.





IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

4.1.1 Keadaan Geografis

Letak geografis dan topografis, keadaan tanah dan luas wilayah Kabupaten Probolinggo terletak pada:

Batas Utara : $7^{\circ} 40' LS$

Batas Selatan : $8^{\circ} LS$

Batas Barat : $112^{\circ} 50' BT$

Batas Timur : $113^{\circ} 3' BT$

dan dikelilingi oleh selat Madura di sebelah utara, sebelah barat adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Luas wilayah daerah Kabupaten Probolinggo 1.696 Km² dan merupakan 3,54 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Probolinggo adalah daerah yang tergolong berfungsi penting untuk hidrologi sehingga pengamanan daerah ini lebih penting, mengingat curah hujan di Kabupaten Probolinggo relatif rendah yaitu di dataran tinggi yang mencakup wilayah bagian selatan rata-rata curah hujannya 2,422 mm setiap tahun dan dataran rendah rata-rata 1,458 mm/tahun.

4.1.2 Kependudukan

4.1.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Dalam pembangunan ekonomi daerah, penduduk mempunyai peranan penting karena aktivitas pembangunan ekonomi memerlukan peran serta penduduk di segala bidang. Dalam hal ini jumlah penduduk di suatu daerah sangat berpengaruh untuk menentukan tingkat vitalitas masyarakat serta untuk menaksir target penduduk untuk kegiatan ekonomi yang diinginkan. Jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo menurut usia kerja dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Probolinggo Menurut Usia Kerja Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980 dan Tahun 1990

Uraian	Sensus Penduduk 1980			Sensus Penduduk 1990		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Usia Bukan Angkatan Kerja (umur 0-9 tahun)	102.175	101.974	204.149	91.305	89.437	180.742
2. Usia Angkatan Kerja Tidak Produktif (umur > 65 tahun)	17.002	21.377	38.379	17.252	23.007	40.329
3. Usia Angkatan Kerja dan Produktif (umur 10-64 tahun)	278.692	295.659	574.351	338.556	357.168	695.724
Jumlah	397.869	419.010	816.879	447.113	469.682	916.795

Sumber data: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999

Penurunan tingkat kelahiran akan berpengaruh terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan penurunan tingkat kematian akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Namun, apabila migrasi netto

(migrasi masuk - migrasi keluar) menurun maka laju pertumbuhan penduduk bisa mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Probolinggo Menurut Kecamatan Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1980 dan Tahun 1990

Kecamatan	Hasil Sensus Penduduk		Pertumbuhan
	1980	1990	
1. Sukapura	16.184	18.608	1,41
2. Sumber	20.628	22.949	1,07
3. Kuripan	24.297	26.868	1,01
4. Bantaran	31.949	35.492	1,06
5. Leces	29.233	44.241	1,21
6. Tegalsiwalan	26.969	30.068	1,20
7. Banyuanyar	41.008	44.932	0,92
8. Tiris	48.700	54.946	1,21
9. Krucil	35.726	41.419	1,49
10. Gading	37.512	40.494	0,77
11. Pakuniran	35.419	38.045	0,72
12. Kotaanyar	28.393	30.934	0,86
13. Paiton	42.281	51.144	1,92
14. Besuk	36.296	39.479	0,85
15. Kraksaan	44.448	51.274	1,44
16. Krejengan	29.301	32.927	1,17
17. Pajarakan	25.771	28.562	1,03
18. Maron	48.102	51.768	0,74
19. Gending	28.679	32.260	1,18
20. Dringu	34.947	40.490	1,48
21. Wonomerto	28.859	32.118	1,08
22. Lumbang	24.154	26.929	1,09
23. Tongas	46.978	53.217	1,25
24. Sumberasih	41.345	47.631	1,43
Jumlah	816.879	916.795	1,16

Sumber data: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999.

Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kecil dapat diakibatkan karena keberhasilan program KB, migrasi penduduk yang berfluktuasi. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi

oleh empat hal, yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), imigrasi (migrasi masuk), emigrasi (migrasi keluar).

4.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk masing-masing daerah tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal-hal yang dapat membedakan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu antara lain karena laju pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah berbeda serta disebabkan pula oleh adanya perpindahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang lain.

Perpindahan penduduk dapat disebabkan karena adanya daya tarik daerah tujuan yang dapat berupa laju pembangunan yang cukup tinggi, luasnya lapangan kerja yang tersedia, besarnya pendapatan yang diterima, adanya jaminan keamanan, tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya daya tarik tersebut menyebabkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing daerah berbeda. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980 dan Tahun 1990.

Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Penduduk		Kepadatan	
		1980	1990	1980	1990
1. Sukapura	102,085	16.184	18.608	159	182
2. Sumber	141,881	20.628	22.949	145	162
3. Kuripan	66,748	24.297	26.868	364	403
4. Bantaran	42,128	31.949	35.492	758	842
5. Leces	36,810	39.233	44.241	1066	1202
6. Tegalsiwalan	41,736	26.696	30.068	640	720
7. Banyuanyar	45,696	41.008	44.932	897	983
8. Tiris	165,667	48.700	54.946	292	332
9. Krucil	172,131	35.726	41.419	208	241
10. Gading	146,846	37.512	40.494	255	276
11. Pakuniran	113,850	35.419	38.045	311	339
12. Kotaanyar	42,580	28.393	30.934	667	726
13. Paiton	53,279	42.281	51.144	794	960
14. Besuk	35,036	36.269	39.479	1035	1127
15. Kraksaan	37,798	44.448	51.274	1176	1357
16. Krejengan	34,428	29.301	32.927	851	956
17. Pajarakan	21,344	25.771	28.562	1207	1338
18. Maron	51,395	48.102	51.768	936	1007
19. Gending	36,615	28.679	32.260	783	881
20. Dringu	31,135	34.947	40.494	1122	1300
21. Wonomerto	45,668	28.859	32.118	632	703
22. Lumbang	123,106	24.154	36.929	196	219
23. Tongas	77,952	46.978	53.217	603	683
24. Sumberasih	30,254	41.345	47.631	1367	1574
Jumlah	1696,168	816.879	916.795	482	541

Sumber data: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999.

4.1.2.3 Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Distribusi penduduk dapat digolongkan dalam berbagai kategori tergantung dari tujuan yang ingin diketahui. Salah satunya adalah distribusi penduduk menurut lapangan usaha. Dengan melihat distribusi tersebut akan diketahui sumber penghasil dari kemampuan lapangan kerja tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Distribusi penduduk menurut lapangan kerja di Kabupaten Probolinggo disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Probolinggo Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 1999.

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan
1. Pertanian	215.128	116.800
2. Pertambangan dan Penggalian	1.301	-
3. Industri Pengolahan	11.845	9.942
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	267	-
5. Konstruksi	15.083	267
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	34.132	51.244
7. Pengangkutan dan Komunikasi	16.913	500
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.034	534
9. Jasa-jasa	20.253	8.607
Jumlah	315.953	187.894

Sumber data: Susenas Tahun 1999 Propinsi Jawa Timur.

4.1.3 Pendapatan Regional Per Kapita Kabupaten Probolinggo

Pendapatan regional per kapita merupakan sebuah indikator ekonomi yang menggambarkan kemakmuran penduduk suatu daerah sehingga penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat dapat dilakukan lebih terarah dan tepat sasaran.

Pendapatan regional per kapita Kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan tahun 1993 pada tahun 1995 sebesar 1.286.850, 35 rupiah. Pada tahun 1996 meningkat sebesar 7,70% yaitu dari 1.286.850, 35 rupiah pada tahun 1995 menjadi 1.385.991, 14 rupiah pada tahun 1996. Pada tahun 1997 pendapatan regional per kapita Kabupaten Probolinggo meningkat sebesar 3,76 % yaitu dari 1.385.991, 14 rupiah pada tahun 1996 menjadi 1.438.174, 52 rupiah pada tahun 1997. Namun, karena adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan penurunan pendapatan regional

per kapita Kabupaten Probolinggo pada tahun 1998 sebesar minus 9,02% yaitu dari 1.438.174, 52 rupiah pada tahun 1997 menjadi 1.308.718, 53 rupiah pada tahun 1998. Pada tahun 1999, dampak krisis mulai dapat diatasi. Hal ini tampak pada peningkatan pendapatan regional per kapita tahun 1999 sebesar 0,89 % yaitu dari 1.308.718, 53 rupiah pada tahun 1998 menjadi 1.320. 343, 22 rupiah pada tahun 1999. Untuk lebih jelas, pendapatan regional per kapita Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran 1.

4.1.4 Kesempatan Kerja

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah dalam hal ini menyangkut pelaksanaan otonomi daerah, komponen kesempatan kerja merupakan salah satu komponen utama sebagai tolok ukur kemakmuran rakyat pada suatu daerah. Kesempatan kerja sebagai komponen pembangunan ekonomi daerah konsep awalnya adalah bahwa semakin banyak perusahaan maka semakin banyak peluang kerja. Namun, konsep tersebut sudah tidak relevan lagi terutama setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999. Konsep baru kesempatan kerja sesuai dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan "kondisi" penduduk daerah (Arsyad, 1999:119). Hal ini perlu diperhatikan oleh para pengusaha dan aparatur pemerintahan daerah agar optimalisasi sumber daya yang dimiliki dapat tercapai sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kesempatan kerja di Kabupaten Probolinggo tercermin pada persentase jumlah penduduk yang bekerja menurut sektor utama yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Probolinggo Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 1999.

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan
1. Pertanian	68,09	62,16
2. Pertambangan dan Penggalian	0,41	-
3. Industri Pengolahan	3,75	5,29
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,08	-
5. Konstruksi	4,77	0,14
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	10,80	27,27
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,35	0,27
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,33	0,28
9. Jasa-jasa	6,41	4,58
Jumlah	100,00	100,00

Sumber data: Susenas 1999 Propinsi Jawa Timur.

4.1.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan masing-masing sektor serta menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan berproduksi masing-masing sektor. Struktur ekonomi suatu daerah akan mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Kabupaten Probolinggo sebagai daerah agraris yang sedang berkembang, pergeseran struktur ekonomi akan bergerak dari sektor primer menuju ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini disebabkan karena percepatan pembangunan sektor primer lebih lambat dari sektor sekunder dan tersier. Sektor primer mempunyai kendala pada potensi alam yang tidak dapat diperbarui.

Pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo pada tahun 1995-1997 menunjukkan peranan sektor primer semakin berkurang walaupun masih menempati urutan pertama, yaitu 42,14% pada tahun 1995 bergeser menjadi 39,81% pada tahun 1997. Pada tahun 1998 struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo mengalami pergeseran yang berkebalikan dari tahun-tahun sebelumnya. Peranan sektor primer meningkat dari 39,81% pada tahun 1997 menjadi 41,80% pada tahun 1998. Pergeseran struktur ekonomi tahun 1998 diakibatkan adanya krisis moneter yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1999, dampak krisis mulai dapat diatasi sehingga struktur ekonomi bergeser pula. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Peranan Sektoral PDRB Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, Tahun 1995-1999 (Persen)

Sektor (1)	Tahun				
	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)	1998 (5)	1999 (6)
Primer	44,43	42,40	42,11	43,89	43,81
1. Pertanian	42,14	40,09	39,81	41,80	41,70
2. Pertambangan dan Pengalihan	2,29	2,31	2,30	2,09	2,11
Sekunder	22,19	23,80	23,75	20,60	20,74
3. Industri Pengolahan	11,73	11,57	11,57	10,70	10,72
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,60	1,75	1,76	1,92	1,92
5. Konstruksi	8,86	10,48	10,42	7,98	8,10
Tersier	33,37	33,80	34,14	35,52	35,45
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,95	14,61	15,12	15,13	15,09
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,64	4,02	4,13	4,21	4,26
8. Keangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,81	4,79	4,72	5,16	5,12
9. Jasa-jasa	10,97	10,38	10,17	11,02	10,98
Total PDRB Kabupaten Probolinggo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999.

4.1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Semakin besar peranan sektoral dalam struktur ekonomi maka semakin besar pula kontribusinya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika suatu sektor mempunyai peranan yang dominan tetapi pertumbuhannya rendah, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan secara keseluruhan. Jika sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang tinggi (BPS Kab. Probolinggo, 1999:47).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi secara riil yang terjadi dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo tahun 1995-1996 relatif tinggi yaitu berturut-turut sebesar 7,46% dan 7,70%. Terjadinya krisis moneter mulai pertengahan tahun 1997 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu 3,77% pada tahun 1997 dan -9,02% tahun 1998. Pada tahun 1999, dampak krisis sudah mulai dapat diatasi sehingga pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan meningkat sebesar 0,89%.

Sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,06%; sektor jasa-jasa sebesar 0,18%; sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,67%. Secara lengkap pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Pertumbuhan ekonomi sektoral Kabupaten Probolinggo
Tahun 1995-1999 (Persen).

Sektor	Tahun				
	1995	1996	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	3,52	2,48	3,03	-4,45	0,67
2. Pertambangan dan Penggalian	6,41	8,36	3,47	-17,42	2,13
3. Industri Pengolahan	10,65	6,27	3,78	-15,88	1,11
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	12,96	17,46	4,56	-0,58	0,72
5. Konstruksi	14,33	27,35	3,17	-30,30	2,40
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,74	12,81	7,54	-8,98	0,67
7. Pengangkutan dan Komunikasi	15,71	18,77	6,69	-7,28	1,95
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,42	1,25	2,41	-0,99	0,06
9. Jasa-jasa	5,50	1,90	1,60	-1,35	0,48
Pertumbuhan Kabupaten Probolinggo	7,46	7,70	3,77	-9,02	0,89

Sumber data: BPS Kab. Probolinggo, 1999.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi di Kabupaten Probolinggo, maka digunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 menurut lapangan usaha pada tahun 1995-1999. Pendekatan yang digunakan adalah metode LQ Statis yang membandingkan besarnya PDRB Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur.

4.2.1.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Hasil perhitungan LQ tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 ditunjukkan pada lampiran 3,4,5,6,7. Apabila suatu sektor mempunyai nilai LQ lebih dari satu maka berarti sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam satu wilayah serta merupakan sektor

unggulan sebagai prioritas pembangunan daerah. Lebih jelas mengenai nilai LQ masing-masing sektor tahun 1995-1999 dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan LQ Statis Per Sektor Kabupaten Probolinggo

Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993

Sektor	1995	1996	1997	1998	1999
1. Pertanian	2,43	2,41	2,49	2,31	2,29
2. Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,45	1,70	2,26	2,40
3. Industri Pengolahan	0,42	0,40	0,38	0,38	0,39
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	0,94	0,99	0,88	0,79
5. Konstruksi	1,31	1,52	1,54	1,48	1,67
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,67	0,69	0,70	0,72	0,70
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,54	0,59	0,63	0,56	0,52
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,72	0,74	0,73	0,85	0,90
9. Jasa-jasa	1,02	1,01	1,01	0,97	0,97

Sumber: Lampiran 3,4,5,6,7

Berdasarkan perhitungan tersebut maka pada tahun 1995 terdapat 4 (empat) sektor unggulan, yakni sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, serta sektor jasa-jasa dengan masing-masing mempunyai nilai LQ sebesar 2,4360246; 1,3490233; 1,3116327; 1,0257497.

Pada tahun 1996, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan diikuti oleh sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa-jasa dengan nilai LQ masing-masing sebesar 2,4144087; 1,5266003; 1,4508671; 1,0172693.

Pada tahun 1997, sektor pertanian masih bertahan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo dengan nilai LQ sebesar 2,4916019. Sektor unggulan berikutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor

konstruksi dan sektor jasa-jasa yang mempunyai nilai LQ secara berturut-turut sebesar 1,7049237; 1,5462734; 1,0168818.

Sektor pertanian pada tahun 1998 masih menjadi sektor unggulan yang mempunyai nilai LQ sebesar 2,3104332. Sektor unggulan berikutnya berturut-turut adalah sektor pertambangan dan penggalan serta sektor konstruksi yang mempunyai nilai LQ masing-masing sebesar 2,2643749 dan 1,4876767.

Pada tahun 1999 yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalan yang mempunyai nilai LQ sebesar 2,4087191. Sektor unggulan kedua adalah sektor pertanian yang mempunyai nilai LQ sebesar 2,2943309 dan sektor unggulan yang ketiga adalah sektor konstruksi yang mempunyai nilai LQ sebesar 1,6713215.

4.2.1.1.1 Sektor Pertanian

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ Statis (*Location Quotient*) sektor pertanian Kabupaten Probolinggo tahun 1995-1998 merupakan sektor unggulan, artinya bahwa sektor pertanian Kabupaten Probolinggo mampu untuk bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam Propinsi Jawa Timur. Dalam konteks otonomi daerah berarti bahwa Kabupaten Probolinggo dapat menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan juga diharapkan mampu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor pertanian.

Tabel 9 berikut menunjukkan hasil perhitungan sub sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 9. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Pertanian Kabupaten Probolinggo
Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993

Sub Sektor	1995	1996	1997	1998	1999
a. Tanaman Bahan Makanan	2,98	2,93	3,13	2,74	2,64
b. Tanaman Perkebunan	1,46	0,14	1,36	1,62	0,16
c. Peternakan	1,21	1,34	1,29	0,57	0,62
d. Kehutanan	1,45	1,67	1,84	2,60	2,74
e. Perikanan	1,59	1,77	1,72	1,96	2,30

Sumber: Lampiran 8,9,10,11,12

4.2.1.1.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode LQ Statis (*Location Quotient*) diketahui bahwa sektor pertambangan dan penggalian dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo, karena pada tahun 1999 nilai LQ sektor ini mempunyai nilai sebesar 2,4087191 dan sub sektor penggalian pada tahun yang sama mempunyai nilai LQ sebesar 3,7711254. Hal ini berarti bahwa sektor pertambangan dan penggalian mampu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Pada tabel 10 dapat dilihat peranan sub sektor unggulan yang terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993

Sub Sektor	1995	1996	1997	1998	1999
Pertambangan Migas	-	-	-	-	-
Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
Penggalian	1,4002612	1,5419255	1,9492949	3,3712353	3,7711254

Sumber: Lampiran 8,9,10,11,12

4.2.1.1.3 Sektor Konstruksi

Dengan menggunakan metode LQ Statis (*Location Quotient*) diketahui bahwa sektor konstruksi dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo karena mempunyai nilai LQ lebih dari 1, yaitu pada tahun 1999 nilai LQ sektor ini sebesar 1,6713215. Hasil perhitungan sektor konstruksi dapat dilihat pada tabel 8.

4.2.1.1.4 Sektor Jasa-jasa

Pendekatan dengan menggunakan metode LQ Statis diketahui bahwa pada tahun 1995-1997 sektor jasa-jasa dapat menjadi sektor unggulan, namun akibat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 sektor ini pada tahun berikutnya tidak dapat dijadikan sektor unggulan. Nilai LQ pada tahun 1998 dan tahun 1999 tidak mencapai angka lebih dari satu, masing-masing nilai LQ berturut-turut sebesar 0,9766393 dan 0,9722121.

Hasil perhitungan LQ sub sektor jasa-jasa dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil Perhitungan LQ Sub Sektor Jasa-jasa Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK Tahun 1993

Sektor/Sub Sektor	1995	1996	1997	1998	1999
a. Pemerintahan Umum	1,049	1,055	1,062	0,996	1,004
b. Swasta	1,004	0,984	0,978	0,959	0,945
- Jasa Sosial Kemasyarakatan	1,104	1,127	1,080	1,157	1,156
- Jasa Hiburan dan Kebudayaan	0,044	0,044	0,041	0,061	0,059
- Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	0,987	0,955	0,961	0,918	0,903

Sumber: Lampiran 8,9,10,11,12

4.2.1.2 Analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

Untuk mengetahui sektor atau sub sektor yang dapat dijadikan unggulan di masa mendatang dapat digunakan metode DLQ yang menekankan pada perbandingan laju pertumbuhan Kabupaten Probolinggo dengan Propinsi Jawa Timur.

Hasil perhitungan DLQ per sektor pada tahun 1995-1999 ditunjukkan pada lampiran 15 dan pada lampiran 18 merupakan hasil perhitungan DLQ per sub sektor. Berdasarkan perhitungan DLQ yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pada pembangunan di Kabupaten Probolinggo untuk masa yang akan datang tidak dapat diharapkan lagi menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan nilai DLQ sektor pertanian besarnya kurang dari satu, dimana berarti bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Probolinggo lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur.

Kondisi demikian selama keadaan masih tetap sama maka pada masa depan sektor tersebut akan kalah bersaing dengan sektor yang sama di daerah lain dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Sektor yang mempunyai nilai DLQ lebih besar dari satu adalah sektor pertambangan dan penggalian, artinya bahwa proporsi laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB di wilayah Propinsi Jawa Timur. Pada masa mendatang, kalau keadaan tidak mengalami perubahan maka dapat diharapkan sektor pertambangan dan penggalian akan unggul dalam persaingan.

4.2.1.3 Rata-rata Laju Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata laju pertumbuhan pada lampiran 13 menunjukkan bahwa di Kabupaten Probolinggo sektor listrik, gas dan air bersih tingkat pertumbuhan rata-ratanya selama kurun waktu 1995-1999 sebesar 5,31 persen rata-rata per tahun. Sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan yakni sebesar - 1,59 persen rata-rata per tahunnya. Adanya penurunan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997.

4.2.2 Analisis Koefisien Pergeseran (CR)

Berdasarkan hasil perhitungan CR pada lampiran 19 dapat diketahui bahwa sektor yang mengalami pergeseran yang mempunyai kecenderungan

menguat adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai CR masing-masing adalah 0,01271; 0,01148; 0,00643; 0,0064. Sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa pergeserannya mempunyai kecenderungan melemah, nilai CR masing-masing sektor tersebut berturut-turut adalah - 0,01313; - 0,00672; - 0,00329; - 0,008; - 0,00589. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 19.

4.2.3 Perbandingan Analisis Sektor Prioritas dengan Analisis Koefisien Pergeseran

Berdasarkan perbandingan antara analisis sektor prioritas dengan analisis koefisien pergeseran menunjukkan bahwa sektor yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran menguat adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sub sektor prioritas adalah sub sektor penggalian dan sub sektor yang mempunyai kemampuan menguat adalah sub sektor bank. Hasil perbandingan tersebut berarti bahwa sektor yang menjadi unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo serta yang mampu dalam memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat tidak sama dengan sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran tinggi.

4.3 Pembahasan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Pemahaman yang mendalam terhadap potensi yang dimiliki daerah akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih terencana dan terarah serta tepat sasaran. Masing-masing daerah mempunyai potensi wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya; kelebihan yang dimiliki oleh satu daerah akan dinikmati oleh daerah lainnya serta keterbatasan suatu daerah akan dapat ditutupi oleh daerah lainnya. Adanya keterbatasan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dan adanya keterbatasan dana, penyebaran sumberdaya-sumberdaya yang tidak merata serta jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong suatu daerah untuk menentukan prioritas pembangunan pada masing-masing sektor. Keterbatasan tersebut mengharuskan adanya prioritas dana pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran serta upaya meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah maka dengan demikian daerah harus lebih banyak menggali potensi yang dimiliki termasuk usaha memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat daerah yang bersangkutan agar dicapai tujuan pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dengan menentukan sektor/sub sektor unggulan daerah maka upaya daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah dapat lebih terarah dan tepat sasaran agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat

serta generasi mendatang sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian pada lampiran 24 menunjukkan bahwa sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Probolinggo adalah sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada lampiran 1 menunjukkan bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian nilainya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Hal ini berarti bahwa peranan sektoralnya terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo juga relatif kecil jika dibandingkan dengan peranan sektoral sektor-sektor yang lain terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa peranan sektoral sektor pertambangan dan penggalian mempunyai trend meningkat pada kurun waktu 1995-1997, namun pada tahun 1998 trend-nya menurun sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1999 upaya pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil, terbukti dari adanya peningkatan kontribusi sektoral masing-masing sektor termasuk sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo.

Sektor konstruksi ternyata mampu menjadi sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo padahal jika dilihat dari nilai PDRB sektor ini pada PDRB Kabupaten Probolinggo relatif kecil dibandingkan dengan nilai PDRB sektor-sektor yang lain (Lihat lampiran 1). Pada tabel 6 menunjukkan bahwa peranan sektoral sektor konstruksi mempunyai trend yang cenderung naik turun.

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang ketiga di Kabupaten Probolinggo padahal PDRB sektor ini relatif lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB sektor-sektor yang lain. Hal ini juga berarti bahwa peranan

sektoral sektor pertanian relatif lebih besar dibandingkan dengan peranan sektoral sektor-sektor yang lain (Lihat tabel 6).

Suatu sektor yang menjadi unggulan pada suatu daerah sebaiknya mempunyai peranan sektoral yang relatif besar terhadap PDRB daerah serta mempunyai nilai PDRB yang relatif besar dibandingkan dengan nilai PDRB sektor yang lain. Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Probolinggo justru yang menjadi sektor unggulan adalah sektor yang mempunyai nilai PDRB yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai PDRB sektor-sektor yang lain. Demikian juga dengan peranan sektoralnya yang relatif kecil dibandingkan dengan peranan sektoral sektor-sektor yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh: (a) pertumbuhan ekonomi sektoral dan pertumbuhan ekonomi nasional, (b) kesempatan kerja/penyerapan tenaga kerja sektoral.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan ditentukannya sektor unggulan daerah yang menjadi prioritas pembangunan dapat mendorong peningkatan pembangunan di daerah sebagai upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi rakyat pada sektor-sektor unggulan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal inilah yang dapat mendorong suatu daerah mempunyai keunggulan komparatif yang kompetitif dibandingkan dengan daerah lain sehingga tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan menjadi pemacu pembangunan daerah yang lebih terencana dan terarah serta tepat sasaran dimana dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan generasi selanjutnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode *Coefisient Resuffle* (CR) yang terdapat pada lampiran 23 menunjukkan bahwa sektor yang pergeserannya menguat adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor konstruksi; sektor pertambangan dan

penggalian; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang pergeserannya menguat relatif tidak terpengaruh dengan terjadinya krisis ekonomi, lebih jelas dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi secara sektoral yang terdapat pada tabel 7.

Perbandingan antara analisis sektor prioritas dengan analisis *Coefisient Resuffle* menunjukkan bahwa sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi dan sektor pertanian. Sektor yang mempunyai kekuatan pergeseran adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini berarti bahwa sektor unggulan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Probolinggo tidak sama dengan sektor yang mempunyai kekuatan pergeseran. Perbedaan ini disebabkan karena yang menentukan kekuatan pergeseran suatu sektor adalah: (a) pertumbuhan ekonomi sektoral; (b) pertumbuhan PDRB sektoral; (c) distribusi PDRB sektoral. Sektor prioritas LQ ditentukan oleh variabel kemampuan pertumbuhan ekonomi, nilai tambah dan DLQ ditentukan oleh gabungan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi.

Hasbullah (1994: 309) menyatakan bahwa alasan perlunya pengembangan sektor ataupun sub sektor unggulan tersebut karena pembangunan sektor atau sub sektor unggulan merupakan salah satu jalur kegiatan dalam upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Selain itu pengembangan sektor atau sub sektor unggulan mampu menciptakan keterkaitan yang sempurna dengan sektor-sektor non unggulan dalam hal bertambahnya permintaan maupun meluasnya lapangan kerja baru. Peningkatan kaitan sektor yang saling mendukung ini pada gilirannya akan

memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan sektor unggulan berikutnya.

Keterkaitan ini dimaksudkan sebagai proses pembangunan peningkatan kemampuan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga meningkat menjadi pendayagunaan surplus untuk kepentingan perdagangan dan untuk diperjualbelikan yang ditandai oleh pemilikan faktor produksi sektor unggulan yang diarahkan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan perdagangan (Hasbullah, 1994: 312). Sehubungan dengan pendapat tersebut, pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo dimaksudkan untuk: (a) untuk mencapai swasembada; (b) untuk keperluan pemasukan pendapatan dari luar daerah. Dengan demikian perlu diperhatikan hal pemilikan faktor produksi baik alam, manusia maupun modal yang mendukung berkembangnya sektor/sub sektor unggulan bagi keberhasilan pembangunan daerah.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sektor unggulan di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 1995-1999 dilihat dari LQ statis adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; serta sektor jasa-jasa dengan nilai LQ rata-rata lebih besar dari satu. Dengan demikian di Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu 1995-1999 belum mengalami pergeseran struktural yang ditunjukkan dengan adanya peranan sektor primer yang masih mendominasi. Lima sektor yang lain tidak dapat diunggulkan terhadap daerah lain di wilayah Propinsi Jawa Timur. Hal ini juga berarti bahwa sektor unggulan tersebut mampu untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Dilihat dari nilai DLQ sektor yang dapat dijadikan unggulan pada masa mendatang adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor konstruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran tinggi selama kurun waktu 1995-1999 di Kabupaten Probolinggo adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor konstruksi; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai CR lebih besar dari nol. Enam sektor yang lain pergeserannya mempunyai kecenderungan melemah dengan nilai CR kurang dari nol.

Perbandingan antara analisis sektor unggulan dengan analisis koefisien pergeseran menunjukkan bahwa sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Probolinggo tidak sama dengan sektor yang mempunyai kemampuan pergeseran tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Probolinggo. Perbedaan ini disebabkan karena yang menentukan kekuatan pergeseran suatu sektor adalah: (a) pertumbuhan ekonomi sektoral; (b) pertumbuhan PDRB sektoral; (c) distribusi PDRB sektoral. Sektor prioritas LQ ditentukan oleh variabel kemampuan pertumbuhan ekonomi, nilai tambah dan DLQ ditentukan oleh gabungan nilai tambah serta pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran-saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

- a. Hendaknya para perencana pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo lebih memperhatikan sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan dan memiliki keunggulan komparatif.
- b. Sektor-sektor ekonomi yang memiliki kecenderungan untuk menguat meskipun bukan sektor yang menjadi unggulan, hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi arahan pengembangan wilayah selanjutnya.
- c. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar sektor/sub sektor yang satu dengan yang lain diusahakan semakin diperluas agar dapat saling menguntungkan dan menciptakan iklim perkembangan yang serasi; oleh karena itu perlu kerja sama antara unsur pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan pihak swasta agar dapat mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Probolinggo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: BPFE-UI
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. 1997. *Produk Domestik Regional Bruto Dalam Angka*. Probolinggo
- . 1998. *Produk Domestik Regional Bruto Dalam Angka*. Probolinggo
- . 1999. *Produk Domestik Regional Bruto Dalam Angka*. Probolinggo
- Budiharsono, Sugeng. 1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Dwidjowijoto, Riant, N. 2000. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Irawan dan Suparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta. LPFE-UI
- Irawati, Erna. 2000. *Analisis Penetapan Sektor Prioritas Dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Tahun 1994-1998*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Mukaromah, 2000. *Analisis Penetapan Prioritas Sektoral Di Kabupaten Jember (Tahun 1994-1998)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Nasir, Moch. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Purtomo, Rafael. 2000. *Otonomi Daerah dan Urgensinya Bagi Konsepsi dan Isu Pembangunan Serta Penggunaan Data Statistik*. Makalah Seminar (Tidak Dipublikasikan). Jember

- Sinar Grafika. 1999a. *GBHN 1999-2004, Tap MPR No IV/MPR/1999*. Jakarta
----- . 1999b. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Jakarta
- Soebardi, dkk. 1988. *Materi Pokok Ekonomi Perencanaan II*. Jakarta: Karunika-
Universitas Terbuka
- Soemodiningrat, Goenawan. 1997. *Alternatif Strategi untuk Penyerahan
Otonomi pada Daerah Tingkat II*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Edisi 5.
Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
- Supranto, J. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. LP3ES
- Yuwono, Prpto. 1999. *Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi
Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999 (Studi Kasus Kotamadia Dati II
Salatiga)*. *Kritis*. Vol. XII No. 2. Salatiga: Program Pascasarjana UKSW

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, Tahun 1995-1999 (Rp. 000.000)

Sektor/Sub Sektor (1)	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)	1998 (5)	1999 (6)
Pertanian	542.215,02	555.655,96	572.466,93	546.972,36	550.626,98
1.1 Tanaman Bahan Makanan	426.281,67	434.097,53	447.075,49	425.149,69	424.403,02
1.2 Tanaman Perkebunan	56.360,51	58.390,78	60.172,52	59.717,95	59.514,78
1.3 Peternakan	27.453,66	28.505,55	29.123,43	12.185,01	13.497,00
1.4 Kehutanan	8.621,00	9.973,65	10.612,12	14.593,49	15.281,26
1.5 Perikanan	23.498,17	24.688,44	25.483,37	35.326,22	37.930,92
I. Pertambangan Dan Penggalian	29.523,37	31.991,16	33.101,44	27.335,94	27.918,22
2.1 Pertambangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Pertambangan Non Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Penggalian	29.523,37	31.991,16	33.101,44	27.335,94	27.918,22
II. Industri Pengolahan	150.897,50	160.362,16	166.423,78	139.989,45	141.541,41
3.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	112.766,11	120.424,59	125.304,53	109.460,19	113.083,70
3.2 Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.437,59	2.759,24	2.848,12	3.013,82	3.163,16
3.3 Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	2.426,48	2.759,66	2.792,04	4.050,64	4.617,15
3.4 Kertas dan Barang Cetakan	25.918,23	26.106,43	26.847,56	13.442,11	12.052,01
3.5 Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	109,43	118,02	121,82	4,69	3,96
3.6 Semen dan Barang Galian bukan Logam	2.974,26	3.518,33	3.701,23	5.027,47	4.586,11
3.7 Logam Dasar Besi dan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8 Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya	821,64	887,51	915,63	982,73	976,97
3.9 Barang Lainnya	3.443,76	3.788,39	3.892,26	4.007,90	3.058,35
V. Listrik, Gas Dan Air Bersih	20.611,31	24.210,54	25.314,06	25.166,86	25.348,83
4.1 Listrik	20.340,69	23.869,01	24.960,54	24.848,35	25.003,17
4.2 Gas Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Air Bersih	270,62	341,52	353,52	318,51	345,66
Konstruksi	114.006,89	145.264,62	149.864,52	104.454,41	106.966,09
I. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	179.567,33	202.562,26	217.421,31	197.903,80	199.239,23
6.1 Perdagangan	165.396,59	185.870,73	199.844,23	185.697,04	186.576,59
6.2 Hotel	5.705,35	6.730,13	6.996,43	2.362,47	2.171,72
6.3 Restoran	8.465,39	9.961,40	10.580,65	9.844,29	10.490,92
II. Pengangkutan Dan Komunikasi	46.901,24	55.706,41	59.436,96	55.111,98	56.188,63
7.1 Angkutan	37.932,15	41.711,92	44.183,46	38.093,63	38.748,96
1. Angkutan Rel	69,74	73,92	77,42	59,22	60,14
2. Angkutan Jalan Raya	33.198,73	36.251,36	38.584,25	33.805,95	34.404,10
3. Angkutan Laut	2.739,46	3.152,83	3.216,55	2.078,65	2.134,82
4. Angkutan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	1.924,22	2.233,81	2.305,22	2.149,81	2.149,89
7.2 Komunikasi	8.969,08	13.994,49	15.252,60	17.018,35	17.439,58
1. Pos dan Telekomunikasi	8.669,33	13.660,10	14.907,86	16.667,38	17.066,20
2. Jasa Penunjang Komunikasi	299,75	334,39	344,65	350,97	373,38
III. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	61.866,39	66.349,74	67.951,62	67.563,90	67.605,48
8.1 Bank	1.458,90	1.534,72	1.665,29	1.084,14	542,21
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	13.387,91	14.201,35	14.772,80	15.312,20	15.557,68
8.3 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4 Sewa Bangunan	39.598,35	42.552,28	43.334,65	43.102,13	43.283,98
8.5 Jasa Perusahaan	7.421,23	8.061,39	8.178,88	8.065,43	8.221,61
Jasa-Jasa	141.201,31	143.888,30	146.194,90	144.219,84	144.908,45
9.1 Pemerintahan Umum	68.667,12	69.469,22	69.603,36	68.997,97	68.407,25
9.2 Swasta	72.534,19	74.419,08	76.591,54	75.221,87	76.501,20
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	17.893,09	18.782,67	19.445,66	18.252,03	18.433,17
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	31,46	34,07	34,66	42,60	45,02
3. Jasa Perorangan Dan Rumah Tangga	54.609,64	55.602,34	57.111,22	56.927,24	58.023,01
Total PDRB Kabupaten Probolinggo	1.286.850,35	1.385.991,14	1.438.174,52	1.308.718,53	1.320.343,22

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999.

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Timur
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993, Tahun 1995-1999 (Rp. 000.000)**

Sektor/Sub Sektor (1)	1995 (2)	1996 (3)	1997 (4)	1998*) (5)	1999**) (6)
Pertanian	9.866.092,64	10.253.902,38	10.360.819,63	9.840.471,06	10.004.104,03
1.1 Tanaman Bahan Makanan	6.337.720,90	6.590.805,73	6.431.044,49	6.448.069,42	6.693.479,92
1.2 Tanaman Perkebunan	1.614.700,21	1.837.424,94	1.992.631,24	1.527.057,75	1.491.946,28
1.3 Peternakan	999.383,91	941.224,07	1.011.884,61	883.726,90	901.457,88
1.4 Kehutanan	262.955,72	266.103,35	259.298,47	233.168,31	232.029,85
1.5 Perikanan	651.331,89	618.344,29	665.960,82	748.448,67	685.190,11
I. Pertambangan Dan Penggalian	970.066,58	982.419,95	875.522,36	501.798,67	483.149,93
2.1 Pertambangan Migas	19.382,62	41.388,30	97.202,46	150.508,21	163.369,06
2.2 Pertambangan Non Migas	16.116,59	16.634,66	12.560,77	14.245,08	11.176,85
2.3 Penggalian	934.567,37	924.396,99	765.759,13	337.045,39	308.604,02
II. Industri Pengolahan	15.802.744,63	17.698.276,00	19.409.565,66	15.104.078,20	15.064.191,66
3.1 Makanan, Minuman dan Tembakau	8.212.794,73	9.125.480,43	10.142.324,72	7.816.188,24	7.824.723,94
3.2 Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.455.121,03	1.752.730,58	1.851.798,62	1.548.896,68	1.542.165,94
3.3 Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	890.624,53	1.062.704,42	1.109.386,04	1.045.095,16	919.429,08
3.4 Kertas dan Barang Cetakan	1.049.736,93	1.018.511,18	1.083.797,53	1.026.515,97	1.049.034,06
3.5 Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	191.297,61	380.911,21	436.537,98	476.422,52	489.743,82
3.6 Semen dan Barang Galian bukan Logam	1.481.082,95	1.713.594,97	1.824.166,91	1.024.332,24	1.060.374,05
3.7 Logam Dasar Besi dan Baja	1.202.124,46	1.222.787,51	1.321.492,16	861.611,30	862.767,59
3.8 Alat Angkutan Mesin dan Peralatannya	1.154.245,30	1.170.357,58	1.362.884,06	1.087.699,68	1.085.198,28
3.9 Barang Lainnya	165.717,10	251.198,12	277.177,64	217.316,39	230.754,91
V. Listrik, Gas Dan Air Bersih	1.011.891,73	1.139.846,68	1.143.104,30	1.179.194,65	1.332.448,19
4.1 Listrik	857.818,61	963.954,72	944.189,26	983.063,81	1.117.208,60
4.2 Gas Kota	39.205,02	60.946,72	75.530,40	68.758,57	81.518,60
4.3 Air Bersih	114.868,10	114.954,23	123.384,64	127.372,28	133.720,99
Konstruksi	3.854.810,05	4.239.635,33	4.370.532,83	2.918.521,24	2.667.858,49
I. Perdagangan, Hotel Dan Restoran	11.866.746,64	12.993.706,42	13.828.696,97	11.369.207,36	11.722.811,23
6.1 Perdagangan	9.542.381,24	10.428.606,02	10.985.850,38	8.967.220,83	9.288.582,22
6.2 Hotel	501.040,93	510.244,62	520.634,88	517.420,36	506.565,24
6.3 Restoran	1.823.324,47	2.054.855,78	2.322.211,71	1.884.566,17	1.927.663,77
II. Pengangkutan Dan Komunikasi	3.800.166,09	4.162.807,67	4.236.276,08	4.051.086,25	4.443.028,71
7.1 Angkutan	3.288.540,30	3.449.166,45	3.420.221,61	3.139.269,80	3.179.811,15
1. Angkutan Rel	38.072,84	39.595,43	41.540,60	54.296,23	71.873,85
2. Angkutan Jalan Raya	2.030.107,56	2.110.793,47	2.024.865,52	1.854.399,39	1.799.529,58
3. Angkutan Laut	193.614,84	199.452,09	222.742,21	198.632,60	180.099,54
4. Angkutan Penyeberangan	26.340,99	28.077,02	28.852,59	27.115,32	24.704,03
5. Angkutan Udara	168.726,44	181.644,12	181.688,90	101.174,21	89.049,29
6. Jasa Penunjang Angkutan	831.677,63	889.604,32	920.531,79	903.652,04	1.014.554,86
7.2 Komunikasi	511.625,79	713.641,22	816.054,47	911.816,45	1.263.217,56
1. Pos dan Telekomunikasi	492.435,43	681.563,21	774.937,45	855.940,61	1.128.426,58
2. Jasa Penunjang Komunikasi	19.190,36	32.078,01	41.117,02	55.875,84	134.790,98
III. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	3.766.255,56	3.979.808,69	4.145.932,45	3.296.433,66	3.107.423,21
8.1 Bank	1.294.504,88	1.363.466,61	1.410.356,84	836.588,73	403.077,71
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	449.001,20	483.641,95	500.965,90	378.901,63	377.927,35
8.3 Jasa Penunjang Keuangan	12.879,96	14.084,37	14.671,57	9.189,93	11.009,83
8.4 Sewa Bangunan	1.138.931,52	1.179.990,41	1.229.140,66	1.120.204,64	1.300.320,16
8.5 Jasa Perusahaan	870.937,99	938.625,35	990.797,47	951.548,73	1.015.088,15
K. Jasa-Jasa	6.101.730,07	6.302.065,91	6.483.125,59	6.138.105,66	6.213.111,13
9.1 Pemerintahan Umum	2.901.104,11	2.932.460,38	2.953.100,48	2.877.668,87	2.839.329,21
9.2 Swasta	3.200.625,96	3.369.605,53	3.530.025,11	3.260.436,79	3.373.781,92
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	718.168,73	742.012,93	811.388,96	655.728,27	664.718,69
2. Jasa Hiburan Dan Kebudayaan	31.132,14	33.794,70	37.819,16	29.078,72	31.823,79
3. Jasa Perorangan Dan Rumah Tangga	2.451.325,09	2.593.797,90	2.680.816,99	2.575.629,80	2.677.239,43
Total PDRB Propinsi Jawa Timur	57.040.503,99	61.752.469,03	64.853.575,86	54.398.896,74	55.038.126,58

Sumber: BPS Kabupaten Probolinggo, 1999.

*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Lampiran 3. Perhitungan LQ tahun 1995 Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	PDRB Kab. Probolinggo		X/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur		X/Y	LQ
1. Pertanian	542.215,02	0,421350485	9.866.092,64	0,172966435	2,436024567		
2. Pertambangan dan Penggalian	29.523,37	0,022942349	970.066,58	0,017006627	1,34902406		
3. Industri Pengolahan	150.897,50	0,117261109	15.802.744,63	0,277044267	0,423257663		
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	20.611,31	0,016016866	1.011.891,73	0,01773988	0,902873412		
5. Konstruksi	114.066,89	0,088643369	3.854.310,05	0,067580224	1,3111631773		
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	179.567,33	0,13954018	11.866.746,64	0,208040704	0,670734992		
7. Pengangkutan dan Komunikasi	46.901,24	0,036446537	3.800.166,09	0,066622239	0,547062625		
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	61.866,39	0,048075823	3.766.255,56	0,066027739	0,728115542		
9. Jasa-jasa	141.201,31	0,109726286	6.101.730,07	0,106971882	1,025748863		
Total PDRB	1.286.850,35		57.040.503,99				

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 4. Perhitungan LQ tahun 1996 Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	PDRB Kab.	Xi/Yn	PDRB Propinsi	X _i /Y	LQ
	Probolinggo		Jawa Timur		
1. Pertanian	555.655,96	0,400908738	10.253.902,38	0,166048459	2,414408061
2. Pertambangan dan Penggalian	31.991,16	0,023081792	982.419,95	0,015908998	1,45086397
3. Industri Pengolahan	160.362,16	0,115702153	17.698.276,00	0,286600297	0,403705628
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	24.210,54	0,017458333	1.139.846,68	0,018458317	0,946350255
5. Konstruksi	145.254,62	0,104809198	4.239.635,33	0,068655316	1,526599892
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	202.562,26	0,146149751	12.993.706,42	0,210415982	0,694575334
7. Pengangkutan dan Komunikasi	55.706,41	0,040192471	4.162.807,67	0,067411194	0,596228439
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	66.349,74	0,047871691	3.979.808,69	0,064447766	0,742798299
9. Jasa-jasa	143.888,30	0,103816175	6.302.065,91	0,102053667	1,017270403
Total PDRB	1.385.991,14		61.752.469,03		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 5. Perhitungan LQ tahun 1997 Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	PDRB Kab. Probolinggo	Xi/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur	XY	LQ
1. Pertanian	572.466,93	0,398051086	10.360.819,63	0,159757106	2,491601757
2. Pertambangan dan Penggalian	33.101,44	0,023016288	875.522,36	0,013499985	1,704912117
3. Industri Pengolahan	166.423,78	0,115718765	19.409.565,66	0,29928289	0,38665346
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	25.314,06	0,017601521	1.143.104,30	0,017625925	0,998615448
5. Konstruksi	149.864,52	0,104204683	4.370.552,83	0,067396776	1,546275161
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	217.421,31	0,151178669	13.828.696,97	0,213229521	0,708995022
7. Pengangkutan dan Komunikasi	59.436,96	0,041328058	4.236.276,08	0,065320624	0,632695394
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	67.951,62	0,047248521	4.145.932,45	0,063927584	0,739094426
9. Jasa-jasa	146.194,90	0,101653101	6.483.125,59	0,099965584	1,01688098
Total PDRB	1.438.174,52		64.853.575,86		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 6. Perhitungan LQ Tahun 1998 Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	PDRB Kab. Probolinggo		PDRB Propinsi Jawa Timur		LQ
	X/Yn	Y/Y	X/Yn	Y/Y	
1. Pertanian	546.972,36	0,417944995	9.840.471,06	0,18089468	2,310432761
2. Pertambangan dan Penggalian	27.335,94	0,020887562	501.798,67	0,009224427	2,264375012
3. Industri Pengolahan	139.989,45	0,106966812	15.104.078,20	0,277654127	0,385252015
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	25.166,86	0,019230154	1.179.194,65	0,021676811	0,887130214
5. Konstruksi	104.454,41	0,079814266	2.918.521,24	0,053650375	1,487673963
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	197.903,80	0,151219529	11.369.207,36	0,20899702	0,723548732
7. Pengangkutan dan Komunikasi	55.111,98	0,042111408	4.051.086,25	0,074470007	0,565481456
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	67.563,90	0,051625997	3.296.433,66	0,060597435	0,851950202
9. Jasa-jasa	144.219,84	0,11019928	6.138.105,66	0,112835113	0,976639957
Total PDRB	1.308.718,53		54.398.896,74		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 7. Perhitungan LQ Tahun 1999 Kabupaten Probolinggo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor	PDRB Kab. Probolinggo	Xi/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur	X _i /Y _n	LQ
1. Pertanian	550.626,98	0,417033216	10.004.104,03	0,181766797	2,294331104
2. Pertambangan dan Penggalian	27.918,22	0,021144668	483.149,93	0,008778458	2,408699569
3. Industri Pengolahan	141.541,41	0,107200467	15.064.191,66	0,273704658	0,391664752
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	25.348,83	0,019198567	1.332.448,19	0,024209548	0,793020464
5. Konstruksi	106.966,09	0,081013851	2.667.858,49	0,048472916	1,671322002
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	199.239,23	0,150899574	11.722.811,23	0,212994372	0,708467423
7. Pengangkutan dan Komunikasi	56.188,63	0,042556078	4.443.028,71	0,080726379	0,52716446
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	67.605,48	0,051202959	3.107.423,21	0,056459465	0,9068977
9. Jasa-jasa	144.908,45	0,109750592	6.213.111,13	0,112887402	0,972212931
Total PDRB	1.320.343,22		55.038.126,58		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 8. Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1995 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor / Sub Sektor	PDRB Kab. Probolinggo		PDRB Propinsi Jawa Timur		LQ
	Xi/Yn	XY	Xi/Yn	XY	
1. Pertanian	542.215,02	0,421350485	9.866.092,64	0,172966435	2,9813912
a. Tanaman Bahan Makanan	426.281,67	0,331259707	6.337.720,90	0,1111109132	1,4648172
b. Tanaman Perkebunan	53.360,51	0,041465979	1.614.700,21	0,028307958	1,2176466
c. Peternakan	27.453,66	0,021333995	999.383,91	0,0175206	1,4532419
d. Kehutanan	8.621,00	0,006699302	262.955,72	0,004609982	1,5991487
e. Perikanan	23.498,17	0,018260219	651.331,89	0,0111418761	1,34902406
2. Pertambangan dan Penggalian	29.523,37	0,0222942349	970.066,58	0,017006627	-
a. Pertambangan Migas	-	-	19.382,62	0,000339804	-
b. Pertambangan Non Migas	-	-	16.116,59	0,000282546	-
c. Penggalian	29.523,37	0,0222942349	934.567,37	0,016384276	1,4002612
3. Jasa-jasa	141.201,31	0,109726286	6.101.730,07	0,106971882	1,025748863
a. Pemerintahan Umum	68.667,12	0,05336061	2.291.104,11	0,050860422	1,04915783
b. Swasta	72.534,19	0,056365676	3.200.625,96	0,056111146	1,004530554
- Jasa Sosial Kemasyarakatan	17.893,09	0,013904561	718.168,73	0,012590504	1,104368896
- Jasa Hiburan dan Kebudayaan	31,46	0,000024447	31.132,14	0,00054579	0,044791952
- Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	54.609,64	0,042436667	2.451.325,09	0,042975165	0,987469553
Total PDRB	1.286.850,35		57.040.503,99		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 9. Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1996 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor / Sub Sektor	PDRB Kab.	Xi/Yn	PDRB	Xj/Y	LQ
	Probolinggo		Propinsi Jawa Timur		
1. Pertanian	555.655,96	0,400908738	10.253.902,38	0,166048459	2,414408061
a. Tanaman Bahan Makanan	434.097,53	0,313203683	6.590.805,73	0,106729428	2,934557871
b. Tanaman Perkebunan	58.390,78	0,042129259	1.837.424,94	0,29754679	1,415886859
c. Peternakan	28.505,55	0,020566906	941.224,07	0,015241885	1,349367614
d. Kehutanan	9.373,65	0,007196041	266.103,35	0,004309193	1,669927757
e. Perikanan	24.688,44	0,017812841	618.344,29	0,010013272	1,778923113
2. Pertambangan dan Penggalian	31.991,16	0,023081792	982.419,95	0,015908998	1,45086397
a. Pertambangan Migas	-	-	41.388,30	0,000670229	-
b. Pertambangan Non Migas	-	-	16.634,66	0,000269376	-
c. Penggalian	31.991,16	0,023081792	924.396,99	0,014969393	1,541932395
3. Jasa-jasa	143.888,30	0,103816175	6.302.065,91	0,102053667	1,017270403
a. Pemerintahan Umum	69.469,22	0,050122412	2.932.460,38	0,047487338	1,055490034
b. Swasta	74.419,08	0,053693763	3.369.605,53	0,054566328	0,984009094
- Jasa Sosial Kemasyarakatan	18.782,67	0,0133551796	742.012,93	0,012015923	1,12781981
- Jasa Hiburan dan Kebudayaan	34,07	0,000024581	33.794,70	0,00054726	0,044916493
- Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	55.602,34	0,040117384	2.593.797,90	0,042003144	0,955104313
Total PDRB	1.385.991,14		61.752.469,03		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 10. Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1997 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor / Sub Sektor	PDRB Kab. Probolinggo	Xi/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur	Yn	LQ
1. Pertanian	572.466,93	0,398051086	10.360.819,63	0,159757106	2,491601757
a. Tanaman Bahan Makanan	447.075,49	0,310863169	6.431.044,49	0,099162527	3,13488551
b. Tanaman Perkebunan	60.172,52	0,041839511	1.992.631,24	0,030725078	1,361738154
c. Peternakan	29.123,43	0,020250275	1.011.884,61	0,015602603	1,297877989
d. Kehutanan	10.612,12	0,007378881	259.298,47	0,030996213	1,845544747
e. Perikanan	25.483,37	0,017719247	665.960,82	0,010268683	1,725561788
2. Pertambangan dan Penggalian	33.101,44	0,023016288	875.522,36	0,013499985	1,704912117
a. Pertambangan Migas	-	-	97.202,46	0,001498798	-
b. Pertambangan Non Migas	-	-	12.560,77	0,000193678	-
c. Penggalian	33.101,44	0,023016288	765.759,13	0,011807508	1,949292603
3. Jasa-jasa	146.194,90	0,101653101	6.483.125,59	0,099965584	1,01688098
a. Pemerintahan Umum	69.603,36	0,048397019	2.953.100,48	0,04553489	1,062855735
b. Swasta	76.591,54	0,053256081	3.530.025,11	0,054430693	0,978420043
- Jasa Sosial Kemasyarakatan	19.445,66	0,013521071	811.388,96	0,01251109	1,080726859
- Jasa Hiburan dan Kebudayaan	34,66	0,000024099	37.819,16	0,000583146	0,041325842
- Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	57.111,22	0,03971091	2.680.816,99	0,041336456	0,960675245
Total PDRB	1.438.174,52		64.853.575,86		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 11. Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor / Sub Sektor	PDRB Kab. Probolinggo	Xi/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur	XY	LQ
1. Pertanian	546.972,36	0,417944995	9.840.471,06	0,18089468	2,310432761
a. Tanaman Bahan Makanan	425.149,69	0,324859532	6.448.069,42	0,118533091	2,740665322
b. Tanaman Perkebunan	59.717,95	0,045630858	1.527.057,75	0,028071483	1,625523596
c. Peternakan	12.185,01	0,009310642	883.726,90	0,016245309	0,573128033
d. Kehutanan	14.593,49	0,011150976	233.168,31	0,004286269	2,601557672
e. Perikanan	35.326,22	0,026992985	748.448,67	0,013758526	1,961909655
2. Pertambangan dan Penggalian	27.335,94	0,020887562	501.798,67	0,009224427	2,264375012
a. Pertambangan Migas	-	-	150.508,21	0,002766751	-
b. Pertambangan Non Migas	-	-	14.245,08	0,000261863	-
c. Penggalian	27.335,94	0,020887562	337.045,39	0,006195812	3,371238883
Total PDRB	1.308.718,53		54.398.896,74		

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 12. Perhitungan LQ Sub Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1999 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993

Sektor / Sub Sektor	PDRB Kab. Probolinggo	Xi/Yn	PDRB Propinsi Jawa Timur		Yn	LQ
1. Pertambangan dan Pengalihan	27.918,22	0,021144668	483.149,93	0,008778458	2,408699569	
a. Pertambangan Migas	-	-	163.369,06	0,002968288	-	
b. Pertambangan Non Migas	-	-	11.176,85	0,000203074	-	
c. Pengalihan	27.918,22	0,021144668	308.604,02	0,005607095	3,771055778	
2. Pertanian	550.626,98	0,417033216	10.004.104,03	0,181766797	2,294331104	
a. Tanaman Bahan Makanan	424.403,02	0,321433861	6.693.479,92	0,121615329	2,643037384	
b. Tanaman Perkebunan	59.514,78	0,045075234	1.491.946,28	0,027107504	1,662832329	
c. Peternakan	13.497,00	0,010222342	901.457,88	0,016378789	0,624120745	
d. Kehutanan	15.281,26	0,011573702	232.029,85	0,004215802	2,745314415	
e. Perikanan	37.930,92	0,028728075	685.190,11	0,012449371	2,307592488	
Total PDRB	1.320.343,22		55.038.126,58			

Sumber data: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 13. Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 1995-1999
Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993

Sektor	PDRB 1995 (P1)	PDRB 1999 (Pn)	Pn/P1	g (%)
1. Pertanian	542.215,02	550.626,98	1,015514067	0,38
2. Pertambangan dan Penggalian	29.523,37	27.918,22	0,945631206	-1,39
3. Industri Pengolahan	150.897,50	141.541,41	0,937997051	-1,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	20.611,31	25.348,83	1,229850504	5,31
5. Konstruksi	114.006,89	106.966,09	0,937748806	-1,59
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	179.567,33	199.239,23	1,109551665	2,63
7. Pengangkutan dan Komunikasi	46.901,24	56.188,63	1,198020138	4,62
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	61.866,39	67.605,48	1,092765878	2,24
9. Jasa-jasa	141.201,31	144.908,45	1,026254289	0,65
Total PDRB	1.286.850,35	1.320.343,22	1,026027012	0,64

Sumber data: Lampiran 1 diolah.

Lampiran 14. Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Per Sektor Tahun 1995-1999
Propinsi Jawa Timur ADHK Tahun 1993

Sektor	PDRB 1995 (P1)	PDRB 1999 (Pn)	Pn/P1	g (%)
1. Pertanian	9.866.092,64	10.004.104,03	1,018042745	0,45
2. Pertambangan dan Penggalian	970.066,58	483.149,93	0,498058525	-15,99
3. Industri Pengolahan	15.802.744,63	15.064.191,66	0,953264259	-1,19
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1.011.891,73	1.332.448,19	1,316789287	7,12
5. Konstruksi	3.854.810,05	2.667.858,49	0,69208559	-8,79
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.866.746,64	11.722.811,23	0,987870693	-0,30
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3.800.166,09	4.443.028,71	1,16916698	3,98
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.766.255,56	3.107.423,21	0,825069664	-4,69
9. Jasa-jasa	6.101.730,07	6.213.111,13	1,018254013	0,45
Total PDRB	57.040.503,99	55.038.126,58	0,964895516	-0,89

Sumber data: Lampiran 2 diolah.

Lampiran 15. Perhitungan DLQ Per Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993

Sektor	$(1+g_m)/(1+g_n)$	$(1+G_1)/(1+G_2)$	DLQ
1. Pertanian	0,997416534	1,013520331	0,923039934
2. Pertambangan dan Penggalian	0,979829093	0,847644031	2,063878425
3. Industri Pengolahan	0,997841812	0,99697306	0,907665654
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,046403021	1,080819292	0,850608041
5. Konstruksi	0,997841812	0,920290586	1,354310109
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,01977345	1,005952982	1,070607034
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,0395469	1,049137322	0,955121791
8. Keuangan, dan Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,015898251	0,961658763	1,315667347
9. Jasa-jasa	1,000099364	1,013520331	0,935520762

Sumber data: Lampiran 13 dan 14 diolah.

Lampiran 16. Perhitungan Rata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK Tahun 1993

No.	Sektor / Sub Sektor	PDRB 1995 (P1)	PDRB 1999 (Pn)	Pn/P1	g (%)
1.	Pertambangan dan Penggalian	29.523,37	27.918,22	0,945631206	-1,39
	1. Pertambangan	-	-	-	-
	2. Penggalian	29.523,37	27.918,22	0,945631206	-1,39
2.	Konstruksi	114.006,89	106.966,09	0,937748806	-1,59
3.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	61.866,39	67.605,48	1,092765878	2,24
	1. Bank	1.458,90	542,21	0,371656727	-21,92
	2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	13.387,91	15.557,68	1,16206936	3,83
	3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-
	4. Sewa Bangunan	39.598,35	43.283,98	1,093075343	2,25
	5. Jasa Perusahaan	7.421,23	8.221,61	1,107850046	2,59
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	179.567,33	199.239,23	1,109551665	2,63
	1. Perdagangan	165.396,59	186.576,59	1,128055844	3,06
	2. Hotel	5.705,35	2.171,72	0,380646235	-21,45
	3. Restoran	8.465,39	10.490,92	1,239271906	5,51
	Total PDRB	1.286.850,35	1.320.343,22	1,026027012	0,64

Lampiran 17. Perhitungan Kata-rata Laju Pertumbuhan Sub Sektor Propinsi Jawa Timur ADHK 1993

No.	Sektor / Sub Sektor	PDRB 1995 (P1)	PDRB (Pn)	Pn/P1	g (%)
1.	Pertambangan dan Penggalian	970.066,58	483.149,93	0,498058525	-15,99
	1. Pertambangan Migas	19.382,62	163.369,06	8,428636583	-70,39
	2. Pertambangan Non Migas	16.116,59	11.176,85	0,693499679	-8,74
	3. Penggalian	934.567,37	308.604,02	0,330210565	-24,19
2.	Konstruksi	3.854.810,05	2.667.858,49	0,69208559	-8,79
3.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.766.255,56	3.107.423,21	0,825069664	-4,69
	1. Bank	1.294.504,88	403.077,71	0,311375967	-25,30
	2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	449.001,20	377.927,35	0,84170677	-4,22
	3. Jasa Penunjang Keuangan	12.879,96	11.009,83	0,85480312	-3,85
	4. Sewa Bangunan	1.138.931,52	1.300.320,16	1,141701794	3,37
	5. Jasa Perusahaan	870.937,99	1.015.088,15	1,165511393	3,90
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.866.746,64	11.722.811,23	0,987870693	-0,30
	1. Perdagangan	9.542.381,24	9.288.582,22	0,973402967	-0,67
	2. Hotel	501.040,93	506.565,24	1,011025666	0,27
	3. Restoran	1.823.324,47	1.927.663,77	1,057224757	1,40
	Total PDRB	57.040.503,99	55.038.126,58	0,964895516	-0,89

Sumber: Lampiran 1 dan 2 diolah

Lampiran 18. Perhitungan DIQ Sub Sektor Kabupaten Probolinggo ADHK 1993

No.	Sektor / Sub Sektor	$(1 + g_n) / (1 + g_n)$	$(1 + G_i) / (1 + G)$	DIQ
1.	Pertambangan dan Penggalian	0,979829093	0,847644031	2,063878425
	1. Pertambangan	-	-	-
	2. Penggalian	0,979829093	0,764907676	3,449106113
2.	Konstruksi	0,977841812	0,920250586	1,354310109
3.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,015898251	0,961658763	1,315667347
	1. Bank	0,775834658	0,753708001	1,15566046
	2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	1,031697138	0,966400968	1,38667392
	3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-
	4. Sewa Bangunan	1,015997615	1,042982545	0,877158832
	5. Jasa Perusahaan	1,019375994	1,048330138	0,869323966
4.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,01977345	1,005952982	1,070607034
	1. Perdagangan	1,024046105	1,002219756	1,094378032
	2. Hotel	0,780504769	1,011704167	0,273281423
	3. Restoran	1,048390302	1,02310564	1,129828643

Sumber: Lampiran 16 dan 17 diolah

Lampiran 19. Perhitungan Koefisien Pergeseran (CR) ADHK Tahun 1993 di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999

Sektor/Sub Sektor	1999		1995		(2) - (4)	(3) - (5)	CR = $\frac{(6) - (7)}{100}$
	(1)	(2)	(3)	(4)			
I. Pertanian							
1. Tanaman Bahan Makanan	41,703	18,177	42,135	17,296	-0,432	0,881	-0,01313
2. Tanaman Perkebunan	32,143	12,161	33,126	11,110	-0,983	1,051	-0,02034
3. Peternakan	4,508	2,711	4,146	2,831	0,129	-0,120	0,00249
4. Kehutanan	1,022	1,638	2,133	1,752	-1,111	-0,114	-0,00997
5. Perikanan	1,157	0,422	0,669	0,461	0,488	-0,039	0,00527
II. Pertambangan dan Penggalian							
1. Pertambangan Migas	2,873	1,245	1,826	1,142	1,047	0,103	0,00944
2. Pertambangan Non Migas	2,114	0,877	2,294	1,700	-0,180	-0,823	0,00643
3. Penggalian	-	0,297	-	0,034	-	0,263	-0,00263
III. Industri Pengolahan							
1. Makanan, Minuman & Tembakau	2,114	0,020	2,294	0,028	-	-0,008	0,00008
2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	10,7200	0,560	11,726	1,638	-0,180	-1,078	0,00898
3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lainnya	8,5647	14,217	8,763	14,398	-1,006	-0,334	-0,00672
4. Kertas dan Barang Cetakan	0,2396	2,802	0,189	2,551	-0,198	-0,181	-0,00017
5. Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	0,3497	1,670	0,189	1,561	0,051	0,251	-0,002
6. Semen dan Barang Galian Non Logam	0,9138	1,906	2,014	1,840	-1,100	0,109	0,00052
7. Logam Dasar Besi dan Baja	0,0003	0,889	0,009	0,335	-0,009	0,554	-0,00563
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	0,3473	1,927	0,231	2,597	0,116	-0,670	0,00786
9. Barang Lainnya	-	1,568	-	2,107	-	-0,539	0,00539
IV. Listrik, Gas dan Air Bersih							
1. Listrik	0,0740	1,972	0,064	2,024	0,010	-0,052	0,00062
2. Gas Kota	0,2316	0,419	0,268	0,291	-0,036	0,128	-0,00164
3. Air Bersih	1,920	2,421	1,602	1,774	0,318	0,647	-0,00329
V. Konstruksi							
1. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,894	2,030	1,581	1,504	0,313	0,526	-0,00213
2. Hotel	-	0,148	-	0,069	-	0,079	-0,00079
3. Restoran	0,026	0,243	0,021	0,201	0,005	0,042	-0,00037
VI. Perdagangan, Hotel dan Restoran							
1. Perdagangan	8,101	4,847	8,864	6,758	-0,763	-1,911	0,01148
2. Hotel	15,089	21,299	13,954	20,804	1,135	0,495	0,0064
3. Restoran	14,131	16,877	12,853	16,729	1,278	0,148	0,0113
	0,164	0,920	0,443	0,878	-0,279	0,042	-0,00321
	0,794	3,502	0,658	3,197	0,136	0,305	-0,00169

Lampiran 20. Perhitungan Skalling CR Sektor di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999 ADHK 1993

No.	Sektor	CR	Skalling	Reskalling	Rangking
1.	Pertanian	-0,01313	-24,77	0	-
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,00343	69,68	75,70	3
3.	Industri Pengolahan	-0,00672	6,18	24,80	7
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	-0,00329	22,74	38,08	5
5.	Konstruksi	0,01148	94,06	95,24	2
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,0064	69,53	75,58	4
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	-0,008	0	0	-
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,01271	100	100	1
9.	Jasa-jasa	-0,00589	10,19	28,02	6

Lampiran 21. Perhitungan Skalling Location Quotient (LQ) Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999

No	Sektor	1995		1996		1997		1998		1999		Total Skalling	Reskalling
		LQ	Skalling										
1.	Pertanian	2,43	100	2,41	100	2,49	100	2,31	100	2,29	94,52	494,52	100
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,34	45,77	1,45	52,24	1,70	62,55	2,26	97,40	2,40	100	357,96	69,75
3.	Industri Pengolahan	0,42	0	0,40	0	0,38	0	0,38	0	0,39	0	0	0
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,90	23,88	0,94	26,86	0,99	28,91	0,88	25,90	0,79	19,90	125,45	18,25
5.	Konstruksi	1,31	65,17	1,52	55,72	1,54	54,97	1,48	56,99	1,67	63,68	296,53	56,14
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,67	12,44	0,69	14,43	0,70	15,16	0,72	17,61	0,70	15,42	75,06	7,09
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,54	5,97	0,59	9,45	0,63	11,84	0,56	9,32	0,52	6,46	43,04	0
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,72	14,92	0,74	16,91	0,73	16,58	0,85	24,35	0,90	25,37	98,13	12,20
9.	Jasa-jasa	1,02	29,85	1,01	30,34	1,01	29,85	0,97	30,56	0,97	28,85	149,45	23,56

Sumber: Lampiran 3,4,5,6,7 diolah.

Lampiran 22. Perhitungan Skalling DLQ Sektor Unggulan Kabupaten Probolinggo tahun 1995-1999.

No.	Sektor	DLQ	Skalling	Reskalling
1.	Pertanian	0,923039934	5,97	1,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,063878425	100	100
3.	Industri Pengolahan	0,907665654	4,70	0
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,850608041	0	0
5.	Konstruksi	1,354310109	41,52	38,53
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,070607034	18,13	14,09
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0,955121791	8,61	4,10
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,315667347	38,33	35,29
9.	Jasa-jasa	0,935520762	6,99	2,40

Sumber: Lampiran 15 diolah.

Lampiran 23. Perhitungan Skalling Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Probolinggo Tahun 1995-1999

No.	Sektor	Pert. Ek.	Skalling	Total Skalling	Reskalling								
		1995		1996		1997		1998				1999	
1.	Pertanian	3,52	0	2,48	2,28	3,03	24,91	-4,45	86,98	0,67	26,07	140,24	3,07
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,41	23,70	8,36	25,38	3,47	32,58	-17,42	43,34	2,13	88,46	213,46	29,07
3.	Industri Pengolahan	10,65	58,49	6,27	17,17	3,78	37,98	-15,88	48,52	1,11	44,87	207,03	26,79
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	12,96	77,44	17,46	61,14	4,56	51,57	-0,58	100	0,72	28,20	318,35	66,32
5.	Konstruksi	14,33	88,68	27,35	100	3,17	27,35	-30,30	0	2,40	100	316,03	65,50
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,74	67,43	12,81	42,87	7,34	100	-8,98	71,74	0,67	26,07	308,11	62,69
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	15,71	100	18,77	66,27	6,69	88,67	-7,28	77,46	1,95	80,77	413,17	100
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9,42	48,40	7,25	21,02	2,41	14,11	-0,99	98,62	0,06	0	182,15	17,95
9.	Jasa-jasa	5,50	16,24	1,90	0	1,60	0	-1,35	97,41	0,48	17,95	131,60	0

Sumber: Probolinggo dalam Angka 2000, diolah



Lampiran 24. Perhitungan Skalling Total Berdasarkan Skalling LQ, DLQ, CR Tahun 1995-1999 ADHK 1993

No.	Sektor	Reskalling			Total Skalling	Reskalling		Ranking
		LQ	DLQ	CR				
1.	Pertanian	100	1,33	0	101,33	40,28	4	
2.	Pertambangan dan Penggalian	69,75	100	75,70	245,45	100	1	
3.	Industri Pengolahan	0	0	24,80	24,80	8,58	8	
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	18,25	0	38,08	56,33	21,64	6	
5.	Konstruksi	56,14	38,63	95,24	190,01	77,03	2	
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,09	14,09	75,58	96,76	38,39	5	
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	0	4,10	0	4,10	0	-	
8.	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	12,20	35,29	100	147,49	59,41	3	
9.	Jasa-jasa	23,56	2,40	28,02	53,98	20,67	7	

Sumber: Lampiran 20, 21, 22 diolah.